

BAB IV

GAMBARAN UMUM TURKI DAN KURDI

4.1 Pengantar

Dasar dari penelitian yang diberi judul “Kebijakan Pemerintah Turki Terhadap Etnis Kurdi : Studi Kasus Setelah Perjanjian Sevres Tahun 1920,” tidak lepas dari gambaran umum dari Turki sendiri maupun Kurdi. Dengan adanya gambaran umum ini dapat dilihat aspek-aspek yang menarik dan cocok untuk diterapkan dalam penelitian ini, sesuai dengan pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian yang ada. Gambaran umum yang akan dijelaskan berupa aspek sejarah, politik, ekonomi, geografi bahkan isu-isu transnasional yang melibatkan Turki maupun Kurdi.

4.2 Gambaran Umum Turki

4.2.1 Latar Belakang Sejarah

Turki modern dibentuk pada tahun 1923 oleh Mustafa Kemal yang kemudian diberi gelar Atatürk atau "Bapak Turki." Di bawah kepemimpinannya yang otoriter, Turki melakukan reformasi di bidang sosial, hukum dan politik. Setelah resmi dipilih jadi ketua parlemen, Mustafa Kemal mengumumkan kebijakannya, yaitu mengubah sistem khilafah dengan republik yang dipimpin seorang presiden yang dipilih lewat Pemilu. Tanggal 29 November 1923, ia dipilih parlemen sebagai presiden pertama Turki.

Mustafa Kemal Pasha mengadakan sidang Dewan Perwakilan Nasional. Tepat 3 Maret 1924 M, ia memecat kholifah, membubarkan sistem khilafah, dan menghapuskan sistem Islam dari negara. Hal ini dianggap sebagai titik klimaks revolusi Mustafa Kemal Pasha.

Di Anatolia, tempat yang pernah menjadi pusat kesultanan, Gerakan Nasional Turki berhasil mengusir tentara kesultanan yang menganggap mereka sebagai pemberontak, kemudian mendeklarasikan berdirinya Republik Turki.

Republik yang baru lahir ini kemudian segera menetapkan status sultan dan keluarganya, dinasti Utsmaniah, sebagai "*persona non grata*" di negara Turki. Untungnya, 50 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1974, Dewan Besar Nasional Turki memutuskan untuk mengembalikan hak warganegara Turki kepada dinasti Utsmaniyah.

Setelah berakhirnya periode satu partai, mulailah dilakukan percobaan dengan melaksanakan politik multi partai yang akhirnya pada pemilihan dimenangkan oleh oposisi yaitu Partai Demokrasi sehingga terjadi pengalihan kekuasaan secara damai. Sejak saat itu, partai politik Turki terus berkembang, namun demokrasi terpecah menjadi periode ketidakstabilan dan seringkali terjadi kudeta militer (1960, 1971, 1980), tetapi dalam setiap kasusnya seringkali kekuasaan kembali ke tangan sipil juga. Pada tahun 1997, militer kembali membantu terjadinya kudeta yang disebut "kudeta post-modern" terhadap pemerintahan yang berorientasi Islam. Turki melakukan intervensi militer terhadap Siprus pada tahun 1974 untuk mencegah Yunani mengambil alih wilayah tersebut dan sejak saat itu Siprus dianggap Turki sebagai negara patron dan disebut "Republik Turki di Siprus Utara."

Munculnya gerakan-gerakan separatis dimulai pada tahun 1984 oleh Partai Pekerja Kurdistan (PKK) – yang sekarang dikenal dengan Kongres Rakyat Kurdistan atau Kongra-Gel (KGK) – telah mendominasi perhatian militer Turki. Setelah tertangkapnya pimpinan dari PKK yaitu Ocalan pada tanggal 15 Februari 1999, gerakan-gerakan pemberontak ini berpindah dari Turki ke Irak Utara. Pada tahun 2004, KGK mengumumkan untuk mengadakan gencatan senjata dan menghentikan serangan terhadap KGK. Turki bergabung dengan Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1945 dan pada tahun 1952 menjadi anggota *North Atlantic Treaty Organization* (NATO). Tahun 1964, Turki menjadi anggota tidak tetap Masyarakat Eropa; dan Turki telah melakukan berbagai perubahan untuk memperkuat ekonomi dan demokrasi di negaranya agar dapat menjadi anggota tetap Uni Eropa.

4.2.2 Geografi

Turki terletak di sebelah tenggara Eropa dan Barat Daya Asia (wilayah barat Bosphorus secara geografis merupakan bagian dari Eropa), berbatasan dengan Laut Hitam, diantara Bulgaria dan Georgia, dan berbatasan dengan Laut Aegean dan Laut Tengah, antara Yunani dan Suriah.

Secara geografis, Turki terletak pada koordinat 39 00 di utara dan 35 00 di timur. Total wilayahnya adalah 780.580 km persegi dengan wilayah daratan sebanyak 770.760 km persegi dan wilayah perairan 9.820 km persegi.

Perbatasan darat Turki sepanjang 2.648 km, dimana 268 km berbatasan dengan Armenia, 9 km dengan Azerbaijan, 240 km dengan Bulgaria, 252 km dengan Georgia, 206 km dengan Yunani, 499 km dengan Iran, 352 km dengan Irak dan 822 km dengan Suriah.

Garis pantai Turki sejauh 7.200 km dengan klaim maritim berupa laut territorial sejauh 6 nm di Laut Aegean; 12 nm di Laut Hitam dan Laut Tengah. Zona Ekonomi Eksklusif Turki hanya terdapat di Laut Hitam saja sampai pada batas maritim yang disetujui dengan bekas negara Uni Soviet.

Bencana alam yang terjadi di Turki adalah gempa bumi, terutama di Turki Utara di sepanjang Laut Marmara sampai Danau Van. Dan isu lingkungan yang muncul di Turki adalah polusi air dari pembuangan limbah kimia dan detergen; polusi udara, khususnya di daerah perkotaan; penebangan hutan; perhatian terhadap minyak yang tumpah akibat meningkatnya lalu lintas kapal di Selat Bosphorus. Akibat dari berbagai isu lingkungan tersebut, Turki telah melaksanakan beberapa perjanjian internasional dalam bidang lingkungan, yaitu ikut serta dalam Traktat Antartika, Keragaman Biologi, Perubahan Iklim, Polusi Udara, Desertifikasi, Spesies yang Dilindungi, Pembuangan Zat-zat Berbahaya, Proteksi Lapisan Ozon, Polusi Kapal, dan Dataran Basah, sedangkan yang ditandatangani tetapi tidak diratifikasi adalah modifikasi lingkungan.

Dilihat dari posisi geografinya, Turki memiliki lokasi yang strategis untuk mengontrol Selat Turki (Bosphorus, Laut Marmara dan Dardanella) yang menghubungkan Laut Hitam dan Laut Aegean. Selain itu, di Turki juga

terdapat tempat legendaris yaitu Gunung Ararat yang merupakan tempat dimana Kapal Nuh bersandar.

4.2.3 Pemerintahan

Turki merupakan negara Republik, yang berdasarkan konvensinya dikenal dengan Republik Turki atau dalam bahasa Turki disebut *Turkiye Cumhuriyeti*. Tipe pemerintahannya adalah republik demokrasi parlementer. Ibukota Turki terletak di Ankara dengan koordinat geografis 39 56 LU, 32 52 BT.

Pembagian daerah administratif Turki terdiri dari 81 propinsi yaitu Adana, Adiyaman, Afyonkarahisar, Agri, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydin, Balikesir, Bartin, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingol, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Canakkale, Cankiri, Corum, Denizli, Diyarbakir, Duzce, Edirne, Elazig, Erzincan, Erzurum, Eskisehir, Gaziantep, Giresun, Gumushane, Hakkari, Hatay, Icel (Mersin), Igrid, Isparta, Istanbul, Izmir (Smyrna), Kahramanmaras, Karabuk, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kirikkale, Kirklareli, Kirsehir, Kocaeli, Konya, Kutahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mugla, Mus, Nevsehir, Nigde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sanliurfa, Siirt, Sinop, Sirnak, Sivas, Tekirdag, Tokat, Trabzon (Trebizond), Tunceli, Usak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak.

Hari kemerdekaan Turki adalah 29 Oktober 1923. Sistem hukumnya diadopsi dari sistem hukum berbagai negara Eropa Kontinental; catatan-catatan dari anggota Pengadilan Eropa atas Hak Asasi Manusia (*the European Court of Human Rights / ECHR*).

Kepala negaranya adalah Abdullah Gul (2007) dengan kepala pemerintahannya Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan (14 March 2003). Kabinet dibentuk berdasarkan Dewan Menteri yang ditunjuk oleh presiden berdasarkan nominasi dari perdana menteri. Presiden dipilih oleh Dewan Nasional setiap tujuh tahun sekali. Perdana menteri ditunjuk oleh presiden diantara anggota parlemen yang ada. Presiden dipilih harus memenuhi dua pertiga dari jumlah mayoritas Dewan Nasional pada dua *ballot* pertama kemudian *simple* mayoritas pada *ballot* ketiga.

Sistem legislasi Turki adalah unikameral dari Dewan Nasional Turki (*Turkiye Buyuk Millet Meclisi*) dengan jumlah kursi 550. Anggota dewan dipilih untuk masa kerja lima tahun. Sistem pengadilan Turki adalah pengadilan konstitusi yang terdiri dari *High Court of Appeals (Yargitay)*; *Council of State (Danistay)*; *Court of Accounts (Sayistay)*; Pengadilan Tinggi Militer; Pengadilan Tinggi Administratif Militer.

Partai politik di Turki antara lain adalah *Anavatan Partisi* (Partai Tanah Air) atau *Anavatan* [Erkan MUMCU], Partai Demokratis Kiri atau DSP [Mehmet Zeki SEZER], Partai Masyarakat Demokratis atau DTP [Ahmet TURK], Partai Kebahagiaan atau SP [Recai KUTAN], Partai Keadilan dan Pembangunan atau AKP [Recep Tayyip ERDOGAN], Partai Aksi Nasionalis atau MHP [Devlet BAHCELI] (kadang kala diterjemahkan sebagai Partai Gerakan Nasionalis), Partai Kemajuan Rakyat (*Halkin Yukselisi Partisi*) atau HYP [Yasar Nuri OZTURK], Partai Rakyat Republik atau CHP [Deniz BAYKAL], Partai Rakyat Sosial Demokrat atau SHP [Murat KARAYALCIN], Partai Kebenaran atau DYP [Mehmet AGAR] (kadang kala diterjemahkan sebagai Partai Cara Benar); Partai Pemuda atau GP [Cem Cengiz UZAN], dengan catatan: para partai yang terdaftar di atas adalah beberapa partai yang lebih berpengaruh dari 49 partai yang dimiliki Turki pada 1 Desember 2004.

Kelompok penekan yang ada di Turki antara lain adalah Gabungan beberapa organisasi dari Perserikatan Sektor Umum atau KESK [Ismail Hakki TOMBUL], Gabungan beberapa organisasi dari Perserikatan Pekerja Revolusioner atau DISK [Suleyman CELEBI], Asosiasi Pelaku Bisnis dan Industriawan Independen atau MUSIAD [Omer BOLAT], Perserikatan Moral Hak Pekerja atau Hak-Is [Salim USLU], Gabungan beberapa organisasi Turki dari Perserikatan Majikan atau TISK [Tugurl KUDATGOBILIK], Konfederasi Pekerja Turki atau Turk-Is [Salih KILIC], Konfederasi Pedagang dan Pengrajin atau TESK [Dervis GUNDAY], Asosiasi Pelaku Bisnis dan Industriawan Turki atau TUSIAD [Omer SABANCI], Perserikatan Turki dari Kamar Dagang dan Bursa Komoditas atau TOBB [M. Rifat HISARCIKLIOGLU].

4.2.4 Ekonomi

Dinamika ekonomi Turki adalah percampuran kompleks dari industri modern dan perdagangan seiring dengan sektor pertanian tradisional yang masih menyerap lebih dari 35% lapangan kerja yang ada. Hal ini memberi kekuatan ekonomi dan dengan cepat menumbuhkan sektor privat, namun negara masih memainkan peran utama di industri dasar, bank, transportasi, dan komunikasi. Sektor industri yang paling besar adalah tekstil dan pakaian, yang membuka sepertiga lapangan kerja di industri; namun menghadapi kompetisi ketat di pasar internasional dengan berakhirnya sistem kuota global. Sektor lain khususnya permobilan dan industri elektronik mengalami peningkatan dalam ekspor Turki. Perkembangan *Gross National Product* (GNP) sebenarnya telah melebihi 6% dalam beberapa tahun, tapi dengan adanya ekspansi yang besar di bidang ini membuat GNP mengalami kemerosotan tajam pada *output* tahun 1994, 1999, dan 2001. Ekonomi mengalami perubahan dengan adanya reformasi ekonomi, dan perkembangan GDP tahun 2004 mencapai 9%, diikuti oleh perkembangan tahunan 5% untuk tahun 2005 dan 2006. Inflasi jatuh ke 7,7% pada 2005, tingkat paling rendah dalam kurun waktu 30 tahun namun meningkat lagi menjadi 9,8% pada 2006. Terlepas dari kekuatan ekonomi yang dicapai dari tahun 2002 - 2006, yaitu sebagian besar sehubungan dengan ketertarikan investor memperbaharui pasar yang ada, IMF mendukung dan kebijakan fiskal yang lebih ketat, namun ekonomi masih terbebani oleh tingginya defisit keuangan yang ada. Pada tahun 2005, investasi langsung asing (FDI) di Turki rata-rata kurang dari 1 milyar dolar setiap tahunnya, tapi sejak adanya reformasi ekonomi dan hukum serta prospek keanggotaan Turki di Uni Eropa diharapkan akan meningkatkan investasi langsung asing. Privatisasi yang terjual mencapai 21 milyar dolar. Minyak mulai mengalir melalui saluran Baku-Tblisi-Ceyhan pada bulan Mei 2006 yang menandai akan dibawanya 1 juta *barrel* per hari dari Caspian untuk dipasarkan.

Produk-produk pertanian Turki antara lain tembakau, kapas, minyak zaitun, gandum, gula, sitrus, dan ternak. Industrinya antara lain tekstil, makanan kaleng, mobil, elektronik, pertambangan (batubara, krom, tembaga,

boron), baja, minyak bumi, konstruksi, kayu, kertas dengan laju pertumbuhan hasil industri mencapai 5,5% pada tahun 2006. Produksi listrik mencapai 143,3 milyar kWh (2004) dengan tingkat konsumsi 140,3 milyar kWh (2005) dan ekspor untuk listrik adalah 1,1 juta kWh (2004) dan mengimpor 500 juta kWh (2004). Produksi minyaknya mencapai 50.000 bbl/hari (2005) dengan konsumsi 715.100 bbl/hari (2005) dan ekspornya mencapai 46.110 bbl/hari (2001) sedangkan mengimpor minyak sebanyak 616.500 bbl/hari (2001). Jumlah persediaan minyak yang ada di Turki adalah 288,4 juta bbl (1 Januari 2002). Produksi gas alam sebanyak 8 juta cu m (2004) dengan konsumsi 22,6 juta cu m (2005), tidak mengekspor dan mengimpor sebanyak 21,73 milyar cu m (2004) dengan cadangan gas alam sebanyak 8,495 milyar cu m (1 Januari 2005).

Nilai ekspor di Turki mencapai 85,21 milyar dolar (2006) dengan komoditi ekspor berupa pakaian, bahan makanan, tekstil, pembuat logam, perlengkapan transportasi. Partner ekspor Turki antara lain Jerman 11,4%, Inggris 8%, Itali 7,9%, Amerika Serikat 5,9%, Prancis 5,4%, Spanyol 4,3% (2006). Nilai impor Turki mencapai 120,9 milyar dolar (2006) dengan komoditi impor berupa mesin, bahan-bahan kimia, barang-barang semi-jadi, bahan bakar, dan peralatan transportasi. *Partner* impor Turki antara lain Rusia 12,7%, Jerman 10,6%, RRC 7%, Itali 6,3%, Prancis 4,8%, Amerika Serikat 4,3%, Iran 4,1% (2006).

Cadangan dari valuta asing dan emas sebanyak 53,42 milyar dolar (2006) dengan hutang eksternal sebanyak 193,6 milyar (30 Juni 2006). Turki menerima bantuan ekonomi dari ODA sebanyak 635,8 juta dolar (2002). Mata uang yang digunakan adalah Lira Turki (TRY) dan Lira Turki lama (TRL) yang dikeluarkan sebelum 1 January 2005.

4.2.5 Isu Transnasional

Pertikaian internasional dalam bidang teritorial, udara dan maritim yang kompleks dengan Yunani di Laut Aegean; status dari utara Siprus yang masih dipertanyakan; Suriah dan Irak memprotes proyek hidrologi Turki untuk mengontrol bagian atas sungai *Euphrates*; Turki telah menunjukkan

perhatiannya atas status Kurdi di Irak; perbatasan dengan Armenia yang masih tertutup melalui Nagorno-Karabakh.

Jumlah pengungsi akibat pertikaian antara PKK Kurdi dan militer Turki dari tahun 1984-1999 berjumlah 1-1,2 juta orang, dan lebih banyak terkonsentrasi di sebelah tenggara Turki (2006).

Dalam isu obat terlarang, Turki menjadi rute kunci transit heroin dari Asia Barat Daya ke Eropa Barat dan dari rute darat, laut dan udara Amerika Serikat; sebagian besar orang Turki dan organisasi *trafficking* internasional beroperasi di luar Istanbul; laboratorium untuk mengkonversi morfin impor menjadi heroin berasal dari wilayah luar Turki namun dekat Istanbul; pemerintah tetap tegas mengontrol wilayah di sekitar area cocok tanam bunga candu (opium) dan hasil dari konsentrasinya; serta lemahnya pengendalian atas masalah cuci uang.

4.3 Gambaran Umum Kurdi

4.3.1 Latar Belakang Sejarah

Melihat latar belakang sejarah etnis Kurdi maka etnis Kurdi tidak dapat digolongkan sebagai bangsa Arab, Persia maupun Turki. Suku Kurdi berasal dari rumpun bangsa Indo-Eropa. Mereka dikenal sebagai suku yang mendiami daerah pegunungan di perbatasan Iraq, Iran dan Turki sejak 8000 tahun yang lalu. Menurut Profesor Mehrdad R Izady, seorang pakar Kurdi dari Universitas Harvard, catatan paling awal mengenai istilah Kurdi ditemukan dalam dokumen Raja Tiglath-Pileser I yang memerintah Assyria dari 1114 hingga 1076 SM. Disebutkan bahwa daerah "Qurti" di gunung Azu termasuk salah satu wilayah yang berhasil ditaklukkan oleh sang raja. Bagi orang Akkadian, sebutan "Kurti" digunakan untuk menunjuk mereka yang tinggal di kawasan pegunungan Zagros dan Taurus Timur, sedangkan orang Babylonia menyebut mereka "Guti" dan "Kardu". Sumber Yahudi, Talmud, beberapa kali menyebut tentang bangsa "Qarduim."

Sementara itu, dalam catatan ekspedisinya pada tahun 401 SM, Xenophon menceritakan pertemuannya dengan orang-orang "Kardykhoi". Ini

diikuti oleh Polybius (130 SM) yang menyebut mereka “Kyrtoi”, dan Strabo (40 M) yang me-latin-kannya menjadi “Cyrtoi”.

Menurut Profesor Izady, setidaknya sejak kurun pertama Masehi, istilah “Kurd” mulai umum dipakai untuk menyebut siapa saja yang mendiami wilayah pegunungan dari Hormuz hingga ke Anatolia. Adapun sejarawan Islam seperti ath-Thabari, al-Ya‘qubi, al-Mas‘udi dan Yaqut, mengakui keberadaan etnis Kurdi sama seperti etnis lainnya (Arab, Parsi, Turki, dan sebagainya).

Apabila ditelusuri dari sejarah masa lampau, etnis Kurdi berasal dari Medes, Persia Kuno.

4.3.2 Geografi

Kurdi adalah kelompok *ethnolinguistic* yang dilihat dari sejarahnya mendiami daerah pegunungan di selatan Kaukasus (pegunungan Zagros dan Taurus), yang secara kolektif merupakan wilayah geografis dari Kurdistan. Area ini meliputi bagian utara Irak, bagian barat dan barat daya Iran, timur laut Suriah dan tenggara Turki. Etnis Kurdi juga ditemukan di barat daya Armenia dan di daerah kantong Azerbaijan (Kalbajar dan Lachin, sampai ke barat dari Nagorno Karabakh). Mereka juga ditemukan di timur laut Iran yaitu di Khurasan. Etnis Kurdi berbicara dalam bahasa Kurdi yang merupakan bagian dari Iran.

4.3.3 Penduduk

Etnis Kurdi dengan populasi 27-37,5 juta jiwa di seluruh dunia dengan lebih dari 20 juta jiwa di Turki, Irak, Iran dan Suriah bermukim di kawasan pegunungan yang membentang di sepanjang keempat negara tersebut. Jumlah pasti dari populasi etnis Kurdi yang tinggal di Timur Tengah tidaklah diketahui dengan pasti. Hal ini dikarenakan belum adanya analisis sensus terbaru dan adanya keengganan dari pemerintah tempat etnis Kurdi tinggal untuk memberikan gambaran akurat terhadap jumlah populasi etnis Kurdi.

Berdasarkan data dari CIA, jumlah populasi etnis Kurdi di Turki mencakup 20% dari total populasi penduduk di Turki, 15-20% di Irak, 8% di

Suriah, 7% di Iran dan 1,3% di Armenia. Di antara semua negara tersebut kecuali Iran, etnis Kurdi merupakan etnis kedua terbesar yang ada di tiap negara di atas. Jumlah kasar dari populasi etnis Kurdi di dunia adalah 55% berdiam di Turki, masing-masing 20% di Iran dan Irak, dan sekitar lebih dari 5% di Suriah. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah total etnis Kurdi secara keseluruhan sekitar 27 sampai 36 juta jiwa.

Etnis Kurdi khususnya di Turki memiliki tingkat kelahiran sekitar 50% lebih tinggi daripada etnis Turki sendiri. Dan hal ini merupakan tantangan demografis tersendiri bagi Turki. Selain populasinya yang cukup signifikan, etnis Kurdi memiliki bahasa dan kebudayaan sendiri dan merupakan suatu kelompok besar dengan sistem sosial yang sangat bervariasi

4.3.4 Aspek Politik

Setelah hampir enam dasawarsa tunduk pada pemerintahan Turki, mulai pertengahan dekade 70-an perjuangan etnis Kurdi untuk memerdekakan diri mulai kembali subur, yang salah satunya dipelopori oleh mahasiswa-mahasiswa yang membentuk *Partiya Karkaran Kurdistan* (PKK) atau Partai Pekerja Kurdi dibawah kepemimpinan Abdullah Ocalan pada tahun 1978. Berdirinya PKK ini merupakan salah satu momentum perjuangan etnis Kurdi, yang sejak pendiriannya terus tumbuh bahkan menjadi simbol bagi etnis Kurdi dalam memperjuangkan hak kemerdekaannya.

Bagi pemerintah Turki sendiri, terutama kalangan militer, kehadiran PKK dianggap menciptakan ketidakstabilan, memperlemah kondisi ekonomi, politik dan integritas wilayah Turki. PKK dianggap sebagai pencipta teror dengan aksi-aksi terorismenya. Pihak militer kerap kali menghubungkan aksi terorisme, penculikan, perusakan dan kerusuhan dengan gerakan pembebasan Kurdi, sehingga militer mempunyai legitimasi untuk menghantam/menghancurkan basis-basis pergerakan Kurdi.

Tertangkapnya Abdullah Ocalan pada hari Senin (15 Februari 1999) di Nairobi, Kenya oleh satuan pasukan khusus Turki telah menimbulkan reaksi sebagian besar masyarakat imigran Kurdi di Eropa Barat, Inggris dan bahkan sampai Kanada dan Australia. Di Jerman digelar demonstrasi besar-besaran

untuk menentang penangkapan terhadap Ocalan. Penangkapan ini mendapat liputan luas dari media massa di banyak negara sehingga dijadikan momentum bagi etnis Kurdi untuk menyebarluaskan perjuangan mereka selama ini.

Abdullah Ocalan yang beraliran Marxis dan menjadi lambang perjuangan Kurdi di Turki menjadi sasaran utama militer Turki, terutama setelah ia pada tahun 1984 mendirikan faksi militer dalam organisasi PKK yang dipimpinnya selama hampir lima belas tahun. Ocalan menghindari kejaran pihak militer Turki dan mengendalikan organisasinya dari Suriah, negara yang dianggap Turki sebagai pelindung perjuangan etnis Kurdi.

Keterlibatan Suriah dalam konflik Kurdi antara lain nampak dalam sengketa wilayah Anatolia (tempat sebagian besar etnis Kurdi menetap), yang diklaim oleh keduanya sebagai bagian dari negaranya. Konflik yang sempat memanas yang ditandai dengan pengerahan pasukan di perbatasan kedua negara pada pertengahan tahun 2002 semakin mempersulit posisi Turki dalam menyelesaikan masalah Kurdi. Suriah dituduh oleh Pemerintah Ankara mensuplai dan melindungi aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh PKK.

Penyebaran etnis Kurdi yang meliputi empat negara dapat diartikan bahwa masalah Kurdi bukan hanya merupakan masalah domestik satu negara saja (dalam hal ini Turki). Kehadiran penduduk Kurdi dalam jumlah cukup besar di Turki, Irak, Suriah dan Iran mengandung arti bahwa sejak era pembentukan negara modern di kawasan Timur Tengah, etnis Kurdi telah menjadi faktor dan secara berkala menjadi faktor penentu dalam hubungan antar negara di kawasan itu. Bagi Turki masalah Kurdi berkaitan satu dengan lainnya. Hal ini terlihat pada saat negara-negara tetangga Turki menggunakan isu Kurdi untuk melemahkan posisinya. Masalah Kurdi sendiri bagi Turki dan negara tetangganya terutama Irak dan Iran telah menimbulkan kepentingan yang hampir sama dalam mengatasi masalah Kurdi ini.

Konflik lintas batas dalam masalah Kurdi, berarti bahwa Turki tidak dapat secara dominan menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kawasan Timur Tengah. Pemerintah Ankara mau tidak mau harus memperhatikan perkembangan masalah Kurdi yang terjadi di negara tetangganya. Sebagai contoh: kebangkitan kalangan Kurdi di Iran pada bulan Januari dan Februari

1979 yang disebabkan oleh melemahnya dan jatuhnya kekuasaan Shah Iran telah membangkitkan harapan etnis Kurdi di Turki sekaligus meningkatkan ketidakstabilan di wilayah perbatasan kedua negara. Pemerintah Ankara juga harus memperhatikan kebijakan yang diterapkan oleh negara-negara tetangganya untuk mengatasi masalah penyebaran penduduk Kurdi, perbaikan kondisi yang didapatkan etnis Kurdi di Irak yang merupakan kelanjutan dari Revolusi 1958 telah membantu memberikan etnis Kurdi dorongan bagi terciptanya momentum baru di Turki. Lebih penting lagi, kebijakan Pemerintah Baghdad terhadap penduduk Kurdi sejak 1974 itu telah dimanfaatkan oleh pihak oposisi Turki dari kalangan Kurdi untuk menuntut hak sama dengan yang diterima oleh kalangan Kurdi di Irak. Sejak tahun 1991, kaum Kurdi Irak telah menikmati hak politik dan budaya secara luas. Hak tersebut tidak dapat diperoleh oleh kalangan Kurdi Turki termasuk pernyataan-pernyataan resmi dari penerapan otonomi akan hak-hak atas politik, bahasa dan hak budaya.

Meskipun dengan skala dan bentuk yang berbeda di setiap tempat, kondisi etnis Kurdi secara umum menampilkan gejala yang hampir sama, yakni : pertama, wilayah Kurdi tumpang tindih dengan perbatasan negara-bangsa sehingga mereka dianggap sebagai hambatan bagi keamanan nasional serta sangat rentan untuk dimanfaatkan ataupun dimanipulasi oleh kekuatan-kekuatan regional maupun internasional. Kedua, wilayah Kurdi di negara-negara tersebut biasanya berada dalam keadaan miskin, wilayah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi minim, serta secara sistematis terpinggirkan dari pusat-pusat ekonomi. Ketiga, sebagai akibat dari dinamika dari proses asimilasi, tekanan dan daya tahan etnis Kurdi di setiap negara sangat dipengaruhi oleh arah dan hasil dari perjuangan etnis Kurdi di negara-negara tetangga lainnya. Keempat, masyarakat Kurdi sendiri merupakan masyarakat yang kompleks dengan beragam kebijakan, ideologi, kelas sosial dan dialek serta memiliki banyak klan. Sehingga konflik terhadap Kurdi sangat sulit didefinisikan dari satu bidang dan aspek saja.

BAB V

KEBIJAKAN PEMERINTAH TURKI TERHADAP ETNIS KURDI SETELAH PERJANJIAN SEVRES TAHUN 1920

5.1 Perjanjian Sevres

Perjanjian Sevres merupakan salah satu perjanjian yang dihasilkan ketika Perang Dunia I terjadi. Perang Dunia I diawali dengan terbunuhnya Putra Mahkota Austria Francis Ferdinand di Sarajevo pada tanggal 28 Juni 1914 oleh Gavrilo Princip (anggota gerakan Serbia Raya). Ketika itu, ia bersama istrinya mengadakan kunjungan untuk melihat dari dekat latihan perang di daerah Bosnia. Ternyata latihan perang itu dianggap sebagai tantangan oleh pihak Serbia Raya (yang didukung oleh Rusia). Kemudian Austria mengirim ultimatum kepada Serbia yang disusul dengan pengumuman perang. Pihak-pihak yang terlibat dalam Perang Dunia I adalah :

1. Pihak Sentral (blok Jerman) yang terdiri dari 4 negara yaitu Jerman, Turki, Bulgaria, Austria-Hongaria.
2. Pihak Sekutu (blok Perancis) yang terdiri dari 23 negara yang antara lain: Perancis, Rusia, Inggris, Italia, Amerika Serikat, Serbia, Belgia, Rumania, Yunani, Portugal, Jepang dan lain-lain.

Setelah Perang Dunia I berakhir yang ditandai dengan kekalahan Jerman, baik negara-negara yang menang perang maupun negara-negara yang kalah perang sibuk mengadakan perjanjian-perjanjian perdamaian. Salah satu perjanjian yang melibatkan Turki adalah Perjanjian Sevres, dimana isi dari perjanjian itu salah satunya memberikan otonomi kepada Kurdistan. Pemberian otonomi itu tercantum dalam Bab III pasal 62 Perjanjian Sevres tanggal 10 Agustus 1920 yang berisi :

“A Commission sitting at Constantinople and composed of three members appointed by the British, French and Italian Governments respectively shall draft within six months from the coming into force of the present Treaty a scheme of local autonomy for the predominantly Kurdish areas lying east of the Euphrates, south of the southern

boundary of Armenia as it may be hereafter determined, and north of the frontier of Turkey with Syria and Mesopotamia, as defined in Article 27, II (2) and (3). If unanimity cannot be secured on any question, it will be referred by the members of the Commission to their respective Governments. The scheme shall contain full safeguards for the protection of the Assyro-Chaldeans and other racial or religious minorities within these areas, and with this object a Commission composed of British, French, Italian, Persian and Kurdish representatives shall visit the spot to examine and decide what rectifications, if any, should be made in the Turkish frontier where, under the provisions of the present Treaty, that frontier coincides with that of Persia.”

Berdasarkan beberapa pasal yang terdapat dalam Perjanjian Sevres (10 Agustus 1920) antara Sekutu dengan Turki, dapat disimpulkan perjanjian ini antara lain berisi :

- a) Daerah Turki diperkecil dan hanya tinggal kota Konstantinopel dan sekitarnya.
- b) Daerah yang penduduknya bukan orang Turki harus dilepaskan.
- c) Smyrna (sekarang Izmir) dan Thracia berada di bawah administrasi Yunani.
- d) Dardanella, Laut Marmora, Selat Bosphorus harus dibuka untuk kapal-kapal dari semua bangsa.
- e) Armenia diberi status merdeka di bawah pengawasan internasional.
- f) Memberi jaminan otonom kepada Kurdistan
- g) Di Asia, Turki memerdekakan Mesopotamia (Irak) dan Palestina (termasuk Transjordan) dan menjadi mandat Inggris; Suriah (termasuk Libanon) menjadi mandat Perancis; serta kerajaan Hijaz

Perjanjian Sevres inilah yang menjadi dasar bagi perjuangan separatis Kurdi yang ada di Turki untuk memperoleh otonomi bahkan merdeka kepada Turki. Dalam Perjanjian Sevres juga telah diakui hak-hak minoritas, antara lain :

- a. Pasal 145 dinyatakan bahwa semua warga negara Turki sama di hadapan hukum dan dapat menikmati hak sipil dan politik yang sama tanpa membedakan ras, bahasa dan agama.
- b. Pasal 147 memberikan hak untuk menggunakan bahasa mereka sendiri

- c. Pasal 149 menyatakan bahwa pemerintah Turki mengakui dan menghormati otonomi pendidikan dan keagamaan dari semua ras minoritas di Turki.

Perjanjian selanjutnya yang dilakukan antara kekuatan Barat dan pemerintah Turki adalah Perjanjian Lausanne pada tahun 1923. Perjanjian ini berdasarkan model dari Perjanjian Minoritas Polandia, dimana dalam Artikel 39 menyatakan bahwa :

”no restriction shall be imposed on the free use by any Turkish national of any language in private intercourse, in commerce, religion, in the press, or in publications of any kind, or at public meetings. Notwithstanding the existence of the official language, adequate facilities shall be given to Turkish nationals of non-Turkish speech for the oral use of language before their own courts.

Tiga bulan setelah penandatanganan Perjanjian Lausanne, Dewan Nasional mendeklarasikan berdirinya Republik Turki kemudian tahun 1924 disetujui Konstitusi tahun 1924. Dalam konstitusi tahun 1924, istilah kewarganegaraan dan warganegara disesuaikan dengan ke-Turki-an. Dalam dokumen tersebut menyatakan bahwa seseorang harus menjadi Turki untuk menjadi anggota parlemen atau pun posisi yang serupa. Etnis Kurdi dan etnis lainnya dapat dikategorikan sebagai Turki selama dia menyangkal identitas etnisnya sendiri. Benih-benih ketidakpuasan pun muncul.

Beberapa perjanjian lain yang berhubungan dengan hak minoritas antara lain adalah Perjanjian Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB tahun 1966 Artikel 15 menyatakan mengenai hak bagi setiap orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, untuk menikmati keuntungan dari kemajuan ilmiah dan penerapan-penerapannya, dan untuk menikmati perlindungan atas karya ilmiah, bahasa dan artistik. Sedangkan Artikel 13 menyatakan tentang hak bagi setiap orang untuk menikmati pendidikan.

Hak seseorang untuk menjadi bagian dari suatu minoritas etnis, agama atau bahasa untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menyebarkan dan mempraktekkan agama mereka, atau untuk menggunakan bahasa mereka

dalam suatu komunitas dimana terdapat anggota lain dari kelompok mereka, termaktub dalam Perjanjian Internasional mengenai Hak Sipil dan Politis, Artikel 27. Hak ini kemudian disetujui kembali dalam Deklarasi PBB mengenai Hak Seseorang untuk menjadi bagian Minoritas Bangsa atau Etnis, Agama dan Bahasa tahun 1992, yang kemudian juga meminta negara-negara untuk mengizinkan agar seseorang dari minoritas tertentu untuk mengembangkan budaya mereka (Artikel 4). Deklarasi Aljazair juga menyatakan tentang hak untuk penduduk minoritas untuk menghormati identitas, tradisi, bahasa dan warisan budaya mereka.

Perjanjian Sevres di atas menjadi dasar bagi perjuangan etnis Kurdi apalagi ditambah dengan beberapa perjanjian internasional lain yang mendukung hak minoritas membuat posisi Kurdi dikuatkan. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut mengenai berbagai kebijakan Turki atas etnis Kurdi khususnya setelah Perjanjian Sevres tahun 1920 dimana akan dibahas mengenai berbagai bentuk tindakan pemerintah Turki yang berlandaskan undang-undang dan melihat sampai sejauh mana pelaksanaan kebijakan tersebut mempengaruhi hubungan dengan etnis Kurdi.

5.2 Kebijakan Politik Turki

5.2.1 Kebijakan Dalam Negeri

Sejarah perjalanan bangsa Kurdi di Turki perjuangannya mengalami pasang surut. Sejak jatuhnya Kekaisaran Ottoman maka pendiri Turki modern, Mustafa Kemal Attaturk, telah menjadikan etnis-etnis tertentu di wilayah bekas Kekaisaran Ottoman menjadi alat tawar bagi kemerdekaan Turki dari jajahan Inggris. Konferensi Laussane yang ditandatangani oleh Attaturk dan Menlu Inggris Lord Curzon pada 24 Juli 1923 menegaskan bahwa segala konstitusi Islami harus dihapuskan jika Turki ingin merdeka. Attaturk kemudian setuju untuk menganut republik sekuler, dan menghapus pemerintahan kekhilafahan yang sebelumnya dianut.

Di suatu negara dalam melaksanakan fungsi pemerintahannya, ada dua fungsi yang harus dilaksanakan yaitu fungsi pengaturan dan pelayanan.

Dalam rangka fungsi pengaturan, setelah Perjanjian Sevres Turki telah

mengadopsi sistem numerasi internasional dan alfabet Latin (1923). Kemudian Turki mengadopsi kode komersial baru (1929), hak voting dan elektoral bagi perempuan dalam pemilu lokal (1930) dan dalam pemilu parlemen (1934), melarang pemakaian kostum-kostum keagamaan di luar tempat ibadah (1934), mengadopsi nama akhir (1935), dan beberapa kebijakan lain yang diadopsi dari Eropa.

Akibat dari pengadopsian ini, segala bentuk pengungkapan diri bagi kaum Kurdi (juga kelompok-kelompok minoritas lain di Turki) yang menunjukkan identitas etnis yang unik direpresi. Kurdi tidak punya hak berpolitik (untuk beberapa lama), tidak punya akses pendidikan, dan informasi. Bahkan sebelum 1991, bahasa Kurdi yang tersebar secara luas dianggap ilegal.

Penyangkalan terhadap eksistensi Kurdi terdapat dalam artikel 14 Eastern Development Plan tahun 1925 yang menyatakan bahwa "barangsiapa yang menggunakan bahasa selain bahasa Turki, di kantor-kantor dan dewan pemerintahan, di sekolah, di pasar maupun bazaar, dinyatakan bersalah karena melanggar hukum dan akan dihukum.

Pada bidang politik terdapat juga pembatasan-pembatasan, Pasal 68 Undang-undang Turki menyatakan bahwa dalam program dan tindakan "tidak boleh bertentangan dengan integritas dari negara baik bangsa maupun wilayahnya.." Untuk itu, partai politik yang hanya didasarkan oleh etnis Kurdi semata dilarang karena ditakutkan akan menjadi ancaman bagi integritas Turki. Namun versi revisi dari pasal ini disetujui pada Oktober 1995.

Konstitusi tahun 1961 memberikan sedikit hak demokratis yaitu kebebasan pers dan menyatakan pikiran, hak untuk membentuk asosiasi dan persatuan perdagangan independen, hak untuk menghadiri rapat publik dan kemerdekaan terhadap pelanggaran atas tempat tinggal warga negara dan hak pribadi. Pada tahun 1963, interpretasi liberal atas konstitusi ini mengarah pada pengakuan terhadap hak untuk mogok dan membentuk persetujuan kolektif. Namun larangan atas pembentukan asosiasi regional yang memungkinkan terjadinya perpecahan dalam negara dikendalikan. Etnis Kurdi pun memperoleh keuntungan atas kebebasan demokratis ini.

Pada tahun 1962 *BarisDunyasi (World of Peace)*, sebuah jurnal liberal Turki mempublikasikan artikel dari penulis, Musa Anter, dalam bahasa, literatur dan legenda Kurdi. Penerbitan jurnal tersebut tidak ditunda karena editornya, Ahmed Hamdi Basar, merupakan seorang terkenal sebagai pendiri dan mantan presiden dari Persatuan Kamar Dagang dan Industri Turki (dan juga merupakan pendiri Persatuan Nasional Pengusaha Turki dan juga merupakan teman dekat Mustafa Kemal. Pada bulan september tahun 1962, majalah bulanan dwibahasa (Turki dan Kurdi) yang disebut *Dicle-Firat(Tigris-Euphrates)* beredar di Istanbul. Majalah ini dipublikasikan oleh para intelektual kiri yang dekat dengan Dr. Azizoglu. Majalahnya cukup sukses beredar di kalangan pelajar di kota dan kemudian dilarang setelah beberapa penerbitan. *Deng (Voice)* dan *Riya Newe (New Path)*, dua publikasi Kurdi lain juga dilarang.

Pada tahun 1966, jurnal sosialis Kurdi pertama, *Yeni Akis (The New Current)*, berdiri di Ankara di bawah editorial Mehmet Ali Aslan, seorang pengacara dari wilayah Ararat yang kemudian menjadi presiden Partai Pekerja Turki. Jurnal tersebut mempublikasikan artikel teoritis mengenai masalah Kurdi dan melindungi ide-ide aliansi antara Kurdi dan kelas pekerja Turki melawan pihak berkuasa, apakah mereka Turki atau Kurdi.

Pada tahun 1970-an, saluran politik telah dibuka bagi etnis Kurdi. Partai Pekerja Kurdistan (Bahasa Kurdi: *Partiya Karkeren Kurdistan* atau PKK) didirikan pada tahun 1970-an oleh Abdullah Ocalan untuk merangkul aspirasi kaum Kurdi. Kelompok bersenjata yang menganut ideologi Marxisme-Leninisme dan nasionalisme Kurdi ini menegaskan bahwa tujuan mereka adalah menciptakan sebuah negara Kurdi merdeka di wilayah Kurdistan (yaitu Turki bagian tenggara, timur-laut Irak, timur-laut Suriah, dan barat-laut Iran). Bagi Turki, organisasi ini bersifat memberontak dan, karena mempergunakan kekuatan bersenjata, menjadi ancaman bagi masyarakat secara umum.

PKK kemudian dikategorikan sebagai organisasi teroris internasional oleh sejumlah negara, termasuk AS dan Uni Eropa. Ankara menuduh bahwa sebanyak 30.000 orang yang menjadi korban dari konflik panjang ini

semata-mata salah PKK. PKK sendiri membantah dengan mengatakan bahwa jalan kekerasan terpaksa diambil sebab konteks perjuangan sudah berubah. Mereka beranggapan bahwa kebutuhan untuk membebaskan rakyat Kurdi dari penindasan kultural yang massif terhadap identitas dan hak-hak Kurdi yang dilakukan oleh pemerintah sudah sampai di puncak tertinggi. Jadi, meskipun langkah-langkahnya dikecam banyak lembaga internasional, PKK tidak ambil peduli. Perjuangan bersenjata pun dilangsungkan sejak 1984, dan memakan korban ribuan jiwa. Tidak hanya itu, karena perang terbuka yang terjadi di antara kedua belah pihak, banyak desa-desa di wilayah tenggara Turki yang ditinggalkan oleh penduduknya (depopulasi). Tercatat, ada sekitar 3000 pemukiman Kurdi yang terhapus dari peta, yang berarti sekitar 378.000 orang Kurdi tidak punya tanah hunian.

Med TV merupakan refleksi dari terjadinya ledakan media elektronik di Turki. Sejak tahun 1990, ketika *chanel* TV bajakan dari Eropa muncul melalui satelit. Sampai tahun 1996, tidak kurang dari 1058 stasiun radio lokal, 108 regional dan 36 nasional muncul, sedangkan untuk stasiun tv 229 lokal, 15 regional dan 15 nasional (baik yang sekular maupun Islam) disiarkan di seluruh negeri. Med tv yang memulai transmisinya pada tahun 1995, hanyalah merupakan salah satu fasilitator bagi diskusi, musik, gambar dan propaganda. Namun kontradiksi dengan tv negara seperti halnya kontradiksi terhadap chanel komersial membuat negara menyatakan jika menonton Med TV merupakan suatu kejahatan (*crime*). TV swasta menentang regulasi negara ini (yang diatur melalui hukum anti teror, Artikel 8 dari konstitusi).

Med TV menyiarkan budaya Kurdi (*folk dance*), musik dan kostum nasional Kurdi. Med TV juga mengajarkan anak-anak yang bahasa ibunya Turki, Jerman atau Swedia. Berita pertama kali disiarkan dengan bahasa Kurdi (Kurmanci), kemudian diulang dengan bahasa Turki, terutama bagi orang-orang Kurdi yang berbicara dengan dialek berbeda misalnya Zazaki.

Perkembangan parlemen Kurdi di pengasingan menandakan dibangunnya *a state in absentia*, negara tanpa wilayah untuk mengatur (tidak memiliki zona bebas). Tanpa terkecuali terjadi dengan bantuan Med TV sebagai wilayah privat di tempat asal (*home*).

Med TV tidak dapat dilihat di Australia, nasionalisme Kurdi sebagai suatu praktek transnasional merupakan subjek politis untuk Kurdi (dalam konteks kebijakan nasional atas multikulturalisme) di Sydney, seperti halnya untuk orang-orang di Istanbul dan Frankfurt. Program radio menggunakan dialek Zazaki (salah satu dialek Kurdi) melakukan debutnya di Melbourne pada tahun 1997 dalam salah satu stasiun multikultural, multibahasa, dimana Australia menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah bagi program-program Kurdi di luar Timur Tengah, sedangkan radio etnis disiarkan di Kurdi pada tahun 1982.

Penangkapan Abdullah Ocalan, pemimpin PKK, pada 15 Februari 1999 di Kedutaan Besar Yunani di Nairobi, ternyata tidak mengendurkan perlawanan Kurdistan. PKK menjawab penangkapan Ocalan dengan serangkaian pengeboman dan serangan bersenjata, baik di Turki maupun di luar Turki. PKK adalah organisasi yang besar dan kuat. Anggotanya meliputi 10-15 ribu gerilyawan aktif, dan 60-75.000 pasukan pendukung. Kelompok-kelompok lain seperti DHKP/C, IDBA-C, TAK, dan lain-lain terus menyerang fasilitas-fasilitas pemerintahan dan publik Turki. Mereka pun mempergunakan aktivitas-aktivitas terorisme (bom, penyanderaan, pembunuhan) untuk membuat pernyataan politik, terutama di Istanbul.

Penyiaran berbahasa Kurdi akhirnya diizinkan oleh pemerintah Turki pada tahun 2002, namun baru dua tahun kemudian penyiaran tersebut diizinkan untuk menggunakan stasiun pemerintah.

Menghadapi meningkatnya aktivitas terorisme di Turki, maka pada Juli 2003, Parlemen Turki memberlakukan "UU Reintegrasi" yang isinya mengurangi masa tahanan atau memberikan kebebasan untuk mereka (tahanan atau gerilyawan yang masih aktif) yang mau menyerahkan senjata dan memberikan informasi seputar gerakan pemberontak. Banyak tahanan yang membuka mulut karena UU ini. Pemerintah Turki melaporkan bahwa hingga Desember tahun yang sama, ada 2.486 tahanan dan 586 kombatan aktif yang melapor.

Konflik antara Turki dengan Kurdi terjadi semenjak 15 Agustus 1984 karena pemerintah Turki dianggap tidak menghargai hak-hak kultural dan

identitas etnis Kurdi. Berbagai upaya diberlakukan untuk membatasi ruang gerak sosio-politis etnis Kurdi. Hal ini menjadi potensi bagi terjadinya konflik antara pemerintah Kurdi dengan etnis Kurdi.

5.2.2 Kebijakan Luar Negeri

Populasi Kurdi yang sebagian besar berada di empat negara yaitu Turki, Irak, Iran dan Suriah menyebabkan masalah-masalah Kurdi seringkali menjadi alat tawar di antara negara-negara tersebut untuk mencapai kepentingan mereka. Kurdi dijadikan sebagai alat tawar dalam pengambilan kebijakan luar negeri yang mereka ambil. Misalnya, keterlibatan Suriah dalam konflik Kurdi dengan Turki. Keterlibatan Suriah dihubungkan dengan adanya sengketa wilayah Anatolia yang diklaim oleh kedua negara sebagai bagian dari negara mereka. Konflik yang sempat memanas yang ditandai dengan pengerahan pasukan di perbatasan kedua negara pada pertengahan 2000 semakin mempersulit posisi Turki dalam menyelesaikan masalah Kurdi. Suriah dituduh oleh Pemerintah Ankara mensuplai dan melindungi aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh PKK.

Masalah Kurdi sendiri bagi Turki dan negara tetangganya terutama Irak dan Iran yang jumlah populasi etnis Kurdinya cukup besar telah memunculkan kepentingan yang hampir sama yaitu kepentingan untuk dapat bersama-sama mengatasi masalah Kurdi.

Melihat konsentrasi populasi etnis Kurdi yang terkonsentrasi di wilayah Kurdistan yang melibatkan batas wilayah beberapa negara memunculkan konflik lintas batas antar negara. Konflik lintas batas dalam masalah Kurdi, berarti Turki tidak dapat secara dominan menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kawasan Timur Tengah. Pemerintah Ankara mau tidak mau harus memperhatikan perkembangan masalah Kurdi yang terjadi di negara tetangganya. Sebagai contoh: kebangkitan kalangan Kurdi di Iran pada bulan Januari dan Februari 1979 yang disebabkan oleh melemahnya dan jatuhnya kekuasaan shah Iran telah membangkitkan harapan etnis Kurdi di Turki sekaligus meningkatkan ketidakstabilan di wilayah perbatasan kedua negara. Pemerintah Ankara juga harus memperhatikan kebijakan yang

diterapkan oleh negara-negara tetangganya. Misalnya untuk mengatasi masalah penyebaran penduduk Kurdi, perbaikan kondisi yang didapatkan etnis Kurdi di Irak yang merupakan kelanjutan dari revolusi 1958 telah membantu memberikan etnis Kurdi dorongan bagi terciptanya momentum baru di Turki. Lebih penting lagi, kebijakan pemerintah Baghdad terhadap penduduk Kurdi sejak 1974 itu telah dimanfaatkan oleh pihak oposisi Turki dari kalangan Kurdi untuk menuntut hak sama dengan yang diterima oleh kalangan Kurdi di Irak. Sejak tahun 1991, etnis Kurdi di Irak telah menikmati hak politik dan budaya secara luas. Hak tersebut tidak dapat diperoleh oleh kalangan Kurdi Turki termasuk pernyataan-pernyataan resmi dari penerapan otonomi akan hak-hak atas politik, bahasa dan hak budaya.

Dalam usaha penyelesaian konflik antara pemerintah Turki dengan etnis Kurdi juga menarik perhatian kalangan internasional dan seringkali menghambat langkah Turki untuk memainkan perannya di percaturan dunia, khususnya Eropa, antara lain dengan belum diterimanya secara penuh Turki dalam Masyarakat Eropa dengan alasan masih adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Turki.

Konflik Kurdi juga telah melibatkan banyak kalangan terutama *Non Governmental Organization* (NGO) Internasional yang bergerak di bidang HAM yang sering mengekspos pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Turki terhadap etnis Kurdi melalui media yang mereka miliki. Hal ini menempatkan Turki dalam posisi yang kurang populer dalam perspektif internasional.

Setiap kebijakan luar negeri Turki mengenai masalah Kurdi berimplikasi terhadap hubungannya dengan negara tetangganya yaitu Irak, Iran dan Suriah yang sama-sama memiliki masalah dengan etnis Kurdi. Kebijakan Turki ini pun tidak dapat dielakkan menjadi perhatian internasional.

5.3 Kebijakan Ekonomi Turki

Kesempatan Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa akan semakin besar ketika resolusi jangka panjang mengenai masalah Kurdi dapat dicapai dengan cara menerapkan reformasi politik dan hukum melalui demokrasi

liberal dan pembangunan ekonomi. Kunci bagi keamanan regional dan pembangunan sosio-ekonomis yang dilakukan Turki adalah untuk memastikan bahwa konfigurasi politik di utara Irak yang berbatasan dengan Turki tetap stabil dan akan membawa hubungan kerjasama dan pertemanan yang lebih baik dengan Turki. Hal ini memungkinkan bagi Turki untuk memainkan peranan regional yang konstruktif dengan memacu demokrasi dan pembangunan ekonomi. Hal ini juga menjadi kepentingan Amerika dan Eropa untuk mencegah berkembangnya terorisme yang anti-Amerika di utara Irak serta Eropa akan terhindar dari perbatasan yang tidak stabil dengan Irak.

Pembangunan ekonomi di utara Irak yang memiliki kekayaan minyak dan diawasi oleh Amerika Serikat akan membawa *spill-over effect* yang positif bagi ekonomi di bagian tenggara Turki. Resolusi atas masalah ekonomi dan penyebab dari kesenjangan ekonomi di Tenggara membutuhkan suatu kebijakan pembangunan yang lebih baik demi kepentingan Turki juga.

Wilayah tenggara Turki mengalami kesenjangan pembangunan sehingga terjadi migrasi yang tinggi, hal ini seiring dengan meningkatnya kepentingan program GAP (Proyek Anatolia Tenggara) yang berencana membangun 22 DAM di Sungai Eufrat dan Tigris serta irigasi dan listrik. Hubungan antara Turki-Kurdi dalam bidang ekonomi harus menciptakan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan dan juga diharapkan dependensi antara Turki, Kurdi di Irak dan etnis lain di Turki semakin erat.

Seperti apa yang terjadi baru-baru ini, harga-harga minyak mentah naik karena para pedagang khawatir atas serangan Turki ke kawasan Kurdi di Irak bagian utara pada awal tahun 2008 dan tindakan ini akan mengganggu suplai minyak dunia. Harga minyak di pasar komoditi New York mencapai 96 dollar 54 sen per barrel, naik hampir dua dollar, meskipun kemudian turun lagi menjadi 95 dollar 88 sen pada penutupan pasar. Para pedagang cemas akan turunnya persediaan minyak Amerika jika terjadi konflik, karena Amerika adalah pengimpor minyak paling besar. Harga minyak bahkan pernah mencapai 99 dollar 29 sen.

Kebijakan ekonomi Turki di tenggara Turki yang berbatasan dengan utara Irak membawa dampak kecurigaan oleh etnis Kurdi di sana. Hal ini

disebabkan ketika invasi AS ke Irak terjadi tahun 2003, Kurdi di Irak cemas bahwa Turki akan masuk ke Irak untuk menguasai wilayah mereka dan menghambat otonomi Kurdi di sana serta akan menguasai minyak Irak. Hal ini dikarenakan sejak adanya invasi justru investasi Turki di Irak Utara dan perbatasan makin berkembang. Kebijakan Turki terhadap perbatasannya dengan Irak yang merupakan produsen minyak terbesar membawa relevansi bagi hubungannya dengan etnis Kurdi di tenggara Turki. Demikian juga kepentingan ekonomi di perbatasan Turki dengan Iran dan Suriah memiliki relevansi dengan hubungan dengan kedua negara.

5.4 Kebijakan Sosial-Budaya Turki

Melihat sejarahnya, etnis Kurdi sejak dulu kala dikenal sebagai suku yang semi-nomaden. Mereka tersebar di pelbagai wilayah (diperkirakan seluas 640.000 km persegi), dari barat laut Iran sampai timur laut Irak, Armenia, Turki, dan timur laut Suriah. Sebagian besar bangsa Kurdi adalah pemeluk Islam Sunni, meskipun ada yang menganut Yudaisme dan Kristen. Mereka tinggal di daerah-daerah rural, dan umumnya melakukan usaha pertanian, atau menggembalakan domba.

Jumlah populasi etnis Kurdi di Turki merupakan yang terbesar dibandingkan dengan populasi di Irak, Iran maupun Suriah. Hal ini juga merupakan salah satu dampak dari kebijakan Turki terhadap etnis Kurdi yaitu ketika pada bulan Agustus 1988, pasukan Irak melancarkan tindakan ofensif besar-besaran terhadap kaum (separatis) Kurdi di Irak Utara sehingga ribuan orang Kurdi mengungsi (diperkirakan mencapai 100.000-150.000) ke perbatasan Turki. Pada awalnya Turki bersimpati. Dengan alasan kemanusiaan dan sejarah (sebagaimana termaktub dalam Traktat Sevres 1920—bahwa kelak Turki harus mengakomodasi kemerdekaan bangsa Kurdi), Turki pun menyediakan semacam perkampungan suaka. Bahkan, Pemerintah Turki waktu itu menolak permintaan Irak untuk mengizinkan pasukan mereka mengejar kaum Kurdi di Turki.

Keterbukaan Turki untuk menampung para pelarian Kurdi ternyata membuat Turki kemudian mengalami kesulitan tersendiri. Sekitar separuh dari

seluruh populasi orang Kurdi tinggal di Turki. Secara cepat, bangsa Kurdi berkembang biak di wilayah Turki. Sekarang, dari sekitar 69.660.559 jumlah orang Turki, 14 hingga 21 jutanya adalah etnis Kurdi. Secara demografis mereka tersebar di wilayah tenggara Turki.

Dalam kebijakan bidang sosial budaya lainnya, Erik-Jan Zürcher menunjukkan bagaimana keambiguan konsepsi tentang budaya Turki dan identitas nasional yang dianut oleh bangsa Turki dimana di satu pihak seringkali disebutkan bahwa setiap orang yang mengadopsi budaya Turki adalah orang Turki, karenanya mendapat hak yang sama. Ini berarti, kelompok etnis non-Turki diharapkan akan mengadopsi budaya Turki dan menghilangkan budayanya sendiri. Di lain pihak, ada yang menyatakan bahwa budaya seseorang dilihat dari keturunannya atau akar budayanya. Dengan kata lain, budaya mulai dilihat sebagai sesuatu yang rasial, karakteristik yang diturunkan. Yang berarti berdasarkan pendapat Zürcher - Kurdi, Laz, Çerkes atau Yahudi tidak akan mungkin mengadopsi budaya Turki dan sampai kapanpun akan tetap menjadi warga kelas dua.

Selain pendapat Erik-Jan Zürcher diatas, ada pernyataan terkenal dari Mustafa Kemal yang dikutip oleh satu koran lokal di Diyarbakir pada tahun 1932 tentang bagaimana identitas di Turki, yaitu menyatakan: "*Orang-orang dari Diyarbakir, Van, Erzurum, Trabzon, Istanbul, Thrace dan Macedonia adalah semua anak-anak yang berasal dari ras yang sama, pembuluh darah dari mineral berharga yang sama.*" Kutipan ini merupakan pengakuan bahwa keempat suku yang ada di Turki (termasuk imigran muslim dari bekas wilayah Ottoman) berbagi sejarah dan elemen budaya yang sama dengan Turki.

Hal ini sebenarnya telah diejawantahkan juga dalam Undang-undang Turki Artikel 66 dari Konstitusi tahun 1982 yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang terikat pada negara Turki melalui ikatan kewarganegaraan adalah orang Turki." Berdasarkan pasal ini, definisi ke-Turkian tidak mengandung unsur rasialisme (dimana dalam banyak cara Kurdi menjadi objek penyangkalan karena seringkali diabaikan identitasnya). Draf konstitusi yang moderat ini menurut Jenderal Hsan Göksel ditegaskan lagi melalui pasal : "Warga negara adalah suatu term umum untuk masyarakat yang tinggal dalam

suatu tanah air yang sama. Sangat tidak mungkin menyatakan bahwa ia merupakan bagian dari suatu bangsa tertentu selama ia bukan merupakan kombinasi dari bahasa, tradisi dan budaya yang sama, sejarah dan keturunan yang sama, di mana faktor-faktor tersebut akan memberi suatu nama bagi suatu bangsa. Dengan menerima seseorang sebagai warga negara, kita tetap tidak akan dapat merubah darah dalam nadinya dan menggantinya dengan darah Turki. Kita tidak akan dapat mengambil nilai-nilai yang ada dalam hati dan pikirannya namun justru kita harus membangun kembali mereka secara fisik dan spiritual dengan budaya Turki dan pandangan Turki.

Dari semua kelompok etnis di dunia, Kurdi adalah salah satu etnis paling besar yang tidak punya status untuk mengatur diri mereka sendiri. Sesuai dengan ahli sejarah William Westermann, "Kurdi dapat mengajukan klaim atas kemurnian ras ... lebih dibandingkan masyarakat yang mendiami Eropa sekarang."

Kebijakan lain terhadap etnis Kurdi antara lain Presiden Turgut Ozal melegalkan penggunaan bahasa Kurdi secara terbatas. Namun bahasa Kurdi hanya dapat digunakan dalam percakapan sehari-hari dan dalam rekaman musik daerah. Penggunaan bahasa Kurdi dalam kantor, penerbitan atau pendidikan masih dianggap sebagai kejahatan. Ketika dipertanyakan kapan bahasa Kurdi dapat digunakan dalam surat kabar, audiokaset, siaran radio dan sekolah, Ozal menyatakan bahwa di masa depan, penggunaan bahasa kurdi sebagai bahasa baik tulisan maupun percakapan akan dizinkan, tetapi menunggu waktu yang tepat. Bahkan di tahun selanjutnya Ozal membolehkan jaringan televisi GAP (Proyek Anatolia Tenggara) untuk menyiarkan program 60 atau 90 menit dalam bahasa Kurdi dan sekolah untuk mengajarkan bahasa Kurdi.

Hingga 1999 pun masih ada batasan-batasan tertentu bagi etnis Kurdi (misalnya siaran radio Kurdi tidak boleh lebih dari 1 jam per hari, lima hari seminggu). Etnis Kurdi merasa tersingkirkan sehingga konflik panjang antara etnis Kurdi dan pemerintah Turki pun berlangsung hingga kini.

Berbagai pendapat di atas menunjukkan bagaimana status Kurdi dan pada akhirnya di pembahasan selanjutnya kita akan melihat bagaimana Turki

menyikapi hal tersebut agar tidak memunculkan konflik atau justru sebaliknya memunculkan konflik. Ratusan tahun berlalu sejak pertama kali etnis Kurdi mendiami wilayah Kurdistan, namun adanya keinginan sebagian pihak untuk mendirikan satu negara independen Kurdi telah menciptakan konflik dengan sebagian populasi Turki dan juga Irak pada wilayah dimana kebanyakan dari etnis Kurdi tinggal. Konflik ini punya implikasi geografis yang penting. Konflik pun tidak dapat dilepaskan dari sejarah Kurdi.

Kurdi adalah pemeluk Agama Islam Sunni yang tinggal di sebagian besar Turki, Irak, Iran dan Suriah. Mereka memiliki perbedaan budaya dan perbedaan budaya ini menjadi potensial bagi terjadinya konflik. Kurdi juga memiliki riwayat konflik dengan beberapa kelompok etnis lain di Timur Tengah. Pada awalnya, keinginan untuk satu tanah air sendiri untuk Kurdi belum dimulai hingga awal 1900, pada masa sekitar Perang Dunia I. Dalam Empat Belas Point yang dinyatakan Presiden Woodrow Wilson adalah menjanjikan Kurdi satu negara berdaulat. Pembentukan negara Kurdi seharusnya telah dipenuhi melalui Perjanjian Sevres pada tahun 1920 di mana dikatakan bahwa Kurdi dapat menjadi negara independen jika mereka menginginkannya.

Dibentuknya negara Turki pada tahun 1923, Kemal Ataturk, sebagai Presiden Turki justru mengabaikan Perjanjian Sevres dan menyangkal status Kurdi. Ini adalah awal dari pertikaian Turki-Kurdi. Pada masa yang bersamaan, Kurdi sendiri mencoba membangun negara semi-independen dan berhasil membentuk Kerajaan Kurdistan, yang bertahan dari tahun 1922 - 1924; kemudian pada tahun 1946, beberapa penduduk Kurdi mendirikan Republik Mahabad, yang hanya bertahan satu tahun. Pada tahun 1924, Turki bahkan mengeluarkan larangan secara hukum penggunaan bahasa Kurdi di tempat umum.

Berbagai faktor lain yang memiliki keterkaitan dengan sosial budaya juga terkait dengan geografi. Geografi wilayah berhubungan secara spesifik kepada geografi budaya, geografi ekonomi, dan geografi politis. Konflik yang merupakan klaim sejarah atas wilayah yang merupakan bagian dari Kurdi dapat dijelaskan berdasarkan pada ke empat area geografi di atas.

Pertama, Kurdi memiliki klaim sejarah yang valid atas wilayah mereka karena telah tinggal di dalam wilayah itu lebih dari 2000 tahun. Meskipun klaim sejarah etnis Kurdi valid, Turki dan Irak memilih mengabaikannya. Kedua, dan mungkin paling penting, adalah bahwa konflik ini melibatkan geografi budaya. Kurdi secara etnis dan secara kultural berbeda. Mereka menggunakan bahasa yang berbeda, meskipun sama-sama pemeluk Agama Islam, mereka mempraktekannya dalam bentuk yang berbeda-beda. Pemerintah Turki melihat apapun religiusitas atau identitas kesukuan yang bukan berasal dari mereka sendiri merupakan suatu ancaman. Faktor ketiga adalah geografi ekonomi di mana sebagian wilayah Irak, Iran, Turki, dan Suriah yang ditinggali etnis Kurdi seringkali disebut Kurdistan. Kurdistan merupakan suatu wilayah strategis bagi Turki dan Irak sebab mengandung sumber daya minyak dan air yang akan selalu mereka upayakan tidak lepas dari genggamannya. Meskipun begitu, di sana tidak ada aktivitas ekonomi yang berpengaruh nyata di daerah, sehubungan dengan embargo dagang Irak sejak tahun 1991. Tetapi status independen Kurdi menyebabkan embargo tidak berlaku bagi mereka. Faktor ke empat adalah geografi politis. Turki tidak ingin kehilangan kontrol atas Kurdistan. Kurdi juga memiliki masalah politis mereka sendiri. Terdapat perbedaan pendapat yang tajam di antara partai politik utama Kurdi, yaitu Partai Demokratis Kurdistan (KDP), dan Perserikatan Patriotik Kurdistan (PUK). Mereka berselisih paham tentang bagaimana cara memecahkan konflik. Hingga konflik internal tidak diselesaikan maka akan sulit bagi mereka untuk mencapai kesepakatan dengan Turki.

5.5 Konflik Pemerintah Turki dengan Etnis Kurdi

Dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, suatu kebijakan yang diambil oleh suatu negara dalam implementasinya tidaklah berjalan mulus dan memiliki resiko kegagalan karena dalam proses implementasinya selalu terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara pembuat dan pelaksana kebijakan dalam mencapai hasil yang diinginkan.

Beberapa kebijakan Pemerintah Turki yang sebelumnya telah dipaparkan di atas memiliki resiko untuk tidak terimplementasi dengan baik karena kebijakan-kebijakan tersebut tidak dilaksanakan sesuai rencana, atau pihak yang terlibat di dalamnya yaitu etnis Kurdi tidak mau bekerjasama, atau terdapat hambatan-hambatan lain yang tidak dapat ditanggulangi oleh Pemerintah Turki. *Implementation gap* antara pihak pembuat kebijakan dengan pihak yang dikenai kebijakan memungkinkan terjadinya konflik antara keduanya.

Konflik kurdi merupakan *protracted social conflict* dengan isu identitas sebagai inti permasalahan. Identitas Kurdi didasarkan pada sejumlah gambaran (*traits*) : budaya dan daerah asal yang sama, mitos akan asal yang sama, kepercayaan Islam, bahasa yang sama, dan sejarah pahit konflik dengan pihak luar.

Berikut akan dibahas mengenai bagaimana respon etnis Kurdi terhadap kebijakan Pemerintah Turki. Respon yang negatif terhadap kebijakanlah yang akan memunculkan konflik.

5.5.1 Sebab-sebab Konflik

Berdasarkan teori Holsti yang membagi beberapa sumber konflik, maka konflik yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah konflik yang disebabkan suatu negara berusaha mempertahankan hak teritorial atau hak istimewa untuk melindungi kepentingan keamanan negaranya. Dalam hal ini adalah posisi Turki dalam mempertahankan hak teritorialnya atas keinginan-keinginan separatis Kurdi dalam memperoleh wilayah sendiri

Turki memiliki kepentingan sangat besar terhadap kawasan Kurdi dan Irak Utara, tempat satu-satunya pemerintahan otonomi berbentuk negara kecil untuk Kurdi berada. Ankara takkan membiarkan otonomi Kurdi di Irak berkembang lebih besar. Turki juga tak mau Irak Utara dijadikan batu loncatan untuk separatisme Kurdi di Turki dan pembentukan Kurdistan.

Pemerintah Turki menyatakan bahwa etnis Kurdi (yang jumlahnya mencapai 20% dari total populasi di Turki) telah menikmati hak penuh sebagai penduduk Turki, dan untuk itu tidak ada masalah Kurdi di Turki, yang ada hanyalah masalah terorisme. Sejak pertengahan tahun 1970, seiring dengan meningkatnya jumlah etnis Kurdi di Turki menyebabkan mereka menginginkan adanya hak budaya, bahasa dan politis terhadap Kurdi. Pemerintah Turki telah menekan keinginan ini karena takut akan memecah belah negara. Penolakan resmi atas pembentukan oposisi Kurdi moderat telah mendorong munculnya ekstremisme, dan di tahun 1984, Ocalan melakukan pemberontakan dan sampai akhir tahun 1999 telah menyebabkan korban sebanyak 31.000 orang, dan sebanyak 3000 desa rusak dan 3.000.000 orang kehilangan rumah.

Pada musim semi tahun 1946, pemerintah Turki mengirim orang-orang Kurdi ke bagian barat dan utara Turki yaitu ke Kars dan Ardahan. Berbagai penyangkalan pun dilakukan terhadap identitas Kurdi. Dalam artikel di *Son Posta* tanggal 11 April 1946 menyatakan bahwa di Turki tidak pernah terdapat minoritas Kurdi baik yang menetap maupun nomaden, dengan dengan atau tanpa kesadaran nasional.

Sumber konflik lain berdasarkan teori Holsti adalah konflik karena kehormatan nasional dimana pemerintah Turki melakukan berbagai kebijakan melalui jalur politik, sosial-budaya maupun militer ketika dianggap tindakan-tindakan etnis Kurdi dapat mengancam integritas negara. Sumber-sumber konflik ini dapat memicu terjadinya konflik nyata antar kedua pihak.

Salah satu ancaman terhadap integritas negara muncul dari Partiya Karkeren Kurdistan (PKK) atau Partai Pekerja Kurdistan yang merupakan gerakan separatis Kurdi yang ingin memisahkan diri dari Turki. PKK berlandaskan Marxisme-Leninisme dan memperjuangkan pembentukan negara Kurdistan. Kurdistan ialah wilayah tinggal etnis Kurdi yang sekarang meliputi Turki, Irak, Iran, dan Suriah.

PKK berasal dari gerakan mahasiswa kiri APOCUS di Ankara, Turki, pimpinan Abdullah Ocalan, seringkali dipanggil Apo. Pertarungan antara

kaum Kiri dan Kanan di Turki membuat kelompok ini tersingkir dan menggabungkan diri dengan nasionalisme Kurdi. Bahkan pada bulan Oktober 1978, dari daerah Kurdi di tenggara Turki, PKK memproklamasikan berdirinya Negara Sosialis Kurdistan.

Berdasarkan teori Joshua S. Goldstein mengenai tipe konflik, ada empat tipe yang berlaku dalam konflik antara Pemerintah Turki dengan etnis Kurdi. *Tipe konflik yang pertama* adalah konflik dalam sengketa perbatasan teritorial (dan termasuk di dalam tipe ini adalah adanya upaya-upaya pemberontakan). Sejak berakhirnya kekhalifahan Usmani dan berdirinya Republik Turki, kaum Kurdi telah berusaha melepaskan diri dan mendirikan negeri sendiri. Begitu Turki Usmani kalah dalam Perang Dunia I, para pemenang perang membagi-bagi wilayah kekhalifahan. Berdasarkan Perjanjian Sevres, wilayah Kurdi akan dimerdekakan menjadi Kurdistan. Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson termasuk yang paling mendukung kelahiran Kurdistan. Namun kesepakatan ini tidak diratifikasi dalam perjanjian berikutnya, Perjanjian Lausanne 1923, antara Republik Turki di bawah Kemal Atatürk dengan Inggris, Perancis, dan Italia.

Merasa diabaikan, kaum Kurdi melancarkan pemberontakan. Yang pertama dilakukan pada 1925 melalui gerakan Azadi dipimpin Syaikh Said Piran dengan sekitar 15 ribu pasukan. Pasukan Turki langsung menumpasnya dengan kekuatan 50 ribu tentara dan bantuan tempur udara. Pada 1927, adik Said, Syaikh Abdurrahman Piran memberontak tetapi kembali gagal.

Kegagalan ini justru membangkitkan semangat separatisme yang makin membesar. Di Oktober 1927 diproklamirkan berdirinya Republik Agiriye (Komara Agiriye) berpusat di Propinsi Agri. Republik baru yang dikenal juga dengan nama Republik Ararat, mendirikan parlemen dan mendapatkan dukungan dari Armenia, Syah Iran, Kurdi di Suriah dan marga Barzani dari kaum Kurdi Irak. Tentara Nasional Kurdistan dipimpin oleh Jenderal Ihsan Nuri Pasha. Ihsan berasal dari marga Jalali yang terkenal sering memberontak terhadap Turki. Dia juga pernah tergabung dalam Gerakan Turki Muda, gerakan reformasi semasa kekhalifahan Usmani. Pemberontakan dan

negara Kurdi ini berakhir pada 1931 setelah Turki berhasil menumpasnya dengan ratusan ribu pasukan.

Pemberontakan terpenting dari semua kisah separatisme ini adalah pemberontakan Dersim pada 1937-1938. Dipimpin Sayyid Reza Dersimi, pemberontakan ini dimulai dari kawasan Dersim, sebelah timur Turki. Kawasan ini adalah tempat berdiam kaum Qizilbasy, pengikut Syiah yang kerap memberontak terhadap kezaliman Turki Usmani.

Pemberontakan dilancarkan sesudah warga Dersim mengadu ke Liga Bangsa-Bangsa bahwa Turki melarang kaum Kurdi bersekolah, memburuh-paksakan warga Kurdi, dan memaksa kaum perempuan mereka menjadi selir. Pemberontakan ini pula yang paling mengancam pemerintahan Turki karena hampir berhasil menguasai Ankara, ibukota Turki modern. Pemberontakan ini berhasil ditumpas dan diikuti oleh pembantaian terhadap kaum Qizilbasy yang menewaskan sedikitnya 65 ribu orang.

Sesudah 1937, keadaan darurat militer diterapkan di kawasan Kurdi. Nasionalisme Kurdi tumbuh lagi pada 1970an sesudah bentrok gerakan Kiri dan kelompok Kanan di Turki. Partai Pekerja Turki (PKK) mulai menunjukkan posisinya.

Tipe konflik kedua adalah konflik atas siapa yang menguasai pemerintahan nasional. Dimana konflik muncul ketika kepentingan elit di suatu negara dipertaruhkan namun melibatkan kepentingan dan konflik dengan negara lain. Hal ini dapat terlihat pada konflik dalam negeri Turki ketika akan melaksanakan serangan ke Irak Utara tahun 2008.

Serangan Turki ke Irak Utara ini lebih didasarkan pada kepentingan elit di Turki. Hal ini tidak terlepas dari persaingan militer *vis-à-vis* pemerintahan sipil dalam kancah politik Turki. Kemenangan kelompok Islam moderat AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan) untuk kedua kalinya di pemilu tahun 2007 cukup membuat tentara gerah sekalipun militer telah berusaha keras menghalanginya. Namun ancaman kudeta dari militer tak menghalangi dominasi AKP di parlemen.

Jabatan presiden yang kini dipegang oleh Abdullah Gul bisa dianggap sebagai kekalahan tambahan militer karena selama ini presiden merupakan

simbol benteng terakhir sekularisme. Militer sebagai penjaga ideologi Kemalisme yang berasaskan fundamentalis sekularisme merasa gerah di hadapan perlambang religiusitas ada di depan mata. Bahkan kini banyak istri pejabat dan politisi perempuan mengenakan jilbab, termasuk Ibu Negara dan istri sang perdana menteri.

Militer Turki makin gelisah kehilangan kekuasaan karena keberadaan pemerintahan sipil Erdogan. Bukan saja kekuasaan simbolis militer sebagai pengawal sekularisme tersingkir, mereka juga tersingkir ke barak. Kekuasaan besar militer ke dalam politik benar-benar dipangkas secara radikal oleh pemerintahan AKP. Kudeta lantas menjadi pilihan.

Turki memang tidak asing dengan pendongkolan pemerintahan sipil oleh militer. Sedikitnya enam kali hal itu terjadi dalam sejarah modern Turki. Tetapi Turki bakal berhadapan dengan rakyat yang mendukung Erdogan dan legitimasi demokratis kuat yang dimiliki AKP. Lagipula, Uni Eropa ada di belakang pemerintahan Turki sekarang. Kudeta militer bakal mengundang konsekuensi buruk yang berlipat bagi pemerintahan Ankara di bawah bedil.

Karena itu bisa jadi sebagian elemen militer Turki berpikir untuk merongrong pemerintahan AKP dengan menjadikan masalah Kurdi sebagai batu loncatan untuk memperoleh kembali dukungan yang dulu hilang dari rakyat melalui pencitraan sebagai pengusung nasionalisme. AKP yang dekat dengan kaum Kurdi akan berada dalam dilema yang berat. Kesalahan langkah dari Erdogan dan AKP inilah yang ditunggu militer sehingga mereka bisa kembali mengendalikan politik melalui partai-partai bentukan dan yang mendukung militer.

Tidak tertutup kemungkinan bahwa serangan-serangan terhadap pasukan Turki oleh PKK didalangi sendiri oleh militer. PKK secara umum masih tunduk pada pimpinan mereka yang dihukum seumur hidup di penjara Turki: Abdullah Ocalan. Perubahan pemikiran dan pernyataan-pernyataan politik yang berubah 180 derajat dari Apo, panggilan akrab untuk Ocalan, menimbulkan dugaan bahwa ia sudah menjadi kaki tangan militer. Ocalan tiba-tiba berubah menganjurkan perdamaian dengan Turki dan hanya meminta otonomi. Prasangka pun muncul bahwa Ocalan telah dipekerjakan intelijen

Turki untuk menimbulkan krisis di perbatasan Turki dan Irak. Dari krisis inilah militer bakal mengambil keuntungan politik.

Kedua kemungkinan di atas mengandaikan kerja sama antara pihak yang saling bermusuhan: militer Turki dan gerilyawan PKK. Bisa dimaklumi bahwa kedua pihak itu dapat bergandeng tangan. Militer mendapatkan keuntungan dari sisi politik dan anggaran dengan keberadaan PKK yang membesar dan makin ganas meneror rakyat. Juga menjadi suatu kenyataan bahwa militer Turki dan PKK adalah dua pihak yang paling tersingkirkan dalam pemilu lalu yang membawa AKP ke kemenangan dan penambahan kursi di parlemen. Jika militer merasa terpinggirkan dari kekuasaan, PKK dan partai-partai Kurdi merasa terpinggirkan dari posisi sebagai perwakilan suara warga Kurdi. Betapa tidak, AKP menggulung 60 persen suara kaum Kurdi di sarang mereka. Bahkan wilayah Diyarbakir yang dulunya lumbung suara bagi PKK direbut popularitasnya oleh AKP dengan perolehan 45 persen. PKK merasa terancam secara politis oleh AKP.

Jika pepatah “musuh musuhku adalah temanku” dipakai, besar kemungkinan militer Turki bekerjasama dengan gerilyawan PKK untuk menghadapi AKP.

Pada bulan Juli 2008, Pemerintah Turki menahan dua pensiunan jenderal sebagai bagian penyelidikan atas tuduhan upaya kudeta terhadap pemerintah pimpinan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan. Hursit Tolon dan Sener Eruygur merupakan bagian dari 21 orang yang pada awal pekan ini dimintai keterangan terkait tuduhan rencana kudeta oleh kelompok sekular.

Kelompok sekular menentang kepemimpinan AKP di pemerintahan Turki. Mereka menuding pemerintah akan meruntuhkan sistem sekuler Turki dan mengganti sistem sekuler itu dengan sistem Islam. Kelompok sekular mendapatkan dukungan kuat dari kalangan militer. Mahkamah Konstitusi Turki juga mendukung pihak sekular dengan menggugurkan amandemen undang-undang yang melarang penggunaan jilbab di universitas. Mahkamah Konstitusi juga menerima tuntutan dari jaksa agar AKP dibekukan dan 70 pejabat AKP termasuk Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan dan Presiden

Abdullah Gul dilarang terlibat kegiatan politik selama lima tahun. Mereka dianggap sedang berusaha untuk memberangus sistem sekular di Turki.

Pertentangan antara pihak AKP yang dibentuk pada 2001 dengan militer semakin tajam, sehingga pemerintahan Perdana Menteri Erdogan mengantisipasi kemungkinan terjadinya kudeta dengan menahan 21 orang yang diduga terkait dengan rencana kudeta terhadap pemerintahan. AKP sendiri membantah bahwa mereka memiliki agenda mengganti sistem sekular di Turki. Mereka juga menegaskan tak akan mengganti sistem di Turki dengan sistem Islam. Bahkan AKP telah melakukan reformasi dan terus berupaya agar Turki masuk Uni Eropa.

Tipe konflik ketiga adalah konflik ekonomi atas perdagangan, uang, sumber-sumber alam, dan lain-lain. Menyadari sumber daya yang dimiliki oleh wilayah Kurdistan dengan kekayaan minyak dan sumber daya airnya yang melimpah, meyakinkan Turki tidak akan membiarkan Pemerintahan Otonom Kurdi di Irak menjadi magnet bagi aspirasi berdirinya Kurdistan. Ankara menganggap Kurdi seperti halnya Cina menganggap Tibet atau Taiwan. Mereka adalah bagian dari negara kesatuan Turki dan tidak berhak mendapat perlakuan istimewa dalam politik wilayah. Kemerdekaan Kurdi dari Turki bisa memunculkan instabilitas di Turki sebagai suatu bangsa dan negara. Maka, stabilitas di Irak Utara yang berbatasan dengan Turki Tenggara menjadi sangat penting.

Tiga tipe konflik pertama dari Goldstein merupakan konflik kepentingan atas materi, sedangkan tiga tipe konflik lainnya yaitu konflik etnis, konflik agama dan konflik ideologi berkaitan dengan benturan gagasan. Konflik yang terjadi antara pemerintah Turki dengan etnis Kurdi tidak hanya berupa konflik kepentingan atas materi tetapi juga terdapat benturan gagasan dimana konflik yang terjadi didasari karena perbedaan etnis, yaitu melalui kebijakan-kebijakan pemerintah Turki yang mengeliminir identitas selain Turki termasuk kepada etnis Kurdi.

Berdasarkan draf dari Peter Harris dan Ben Reilly tahun 2000 mengenai potensi konflik, maka potensi konflik yang dominan terjadi antara

Pemerintah Turki dan etnis Kurdi antara lain dengan adanya kekerasan atau tindakan represif yang dilakukan oleh Pemerintah Turki untuk mewujudkan tertib sosial secara cepat terhadap etnis Kurdi separatis. Tindakan kekerasan merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia yang akhirnya menimbulkan konflik dan korban dalam jumlah besar.

Tindak kekerasan militer dan pertentangan elit di Turki pun menambah potensi konflik terhadap etnis Kurdi di Turki. Misalnya dalam meningkatnya kekerasan di bagian tenggara Turki dalam beberapa pekan di bulan Juni 2007, Pemberontak Partai Pekerja Kurdistan (PKK) melalui juru bicaranya, Firat, mempersalahkan militer atas hal tersebut karena terdapat peningkatan dalam operasi (tentara) meskipun gencatan senjata sepihak yang PKK pertahankan sejak 1 Oktober 2006 belum diakhiri secara resmi.

Militerisasi di provinsi tenggara Turki tidak hanya merusak ekonomi regional tetapi juga merusak logika ekonomi dimana kepentingan ekonomi yang diutamakan daripada kepentingan sipil. Misalnya rekrutmen orang-orang desa Kurdi menjadi milisi sipil untuk melindungi desa (*kurucular*).

Kekerasan di Turki tenggara pada tahun 2007 menewaskan 56 anggota pasukan keamanan dan 74 pemberontak PKK. Tujuh warga sipil tewas pada Mei 2007 ketika seorang pembom bunuh diri, yang diduga seorang militan Kurdi, meledakkan dirinya di sebuah pusat perbelanjaan yang sibuk di Ankara.

Tindak kekerasan militer tetap berlangsung di Turki Tenggara sampai awal tahun 2008. Dewan Keamanan Nasional Turki (MGK) pada Kamis tanggal 21 Februari 2008 menyatakan operasi lintas-perbatasan terhadap PKK akan dilanjutkan selama Angkatan Bersenjata Turki memandangnya perlu. Pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan MGK di Istana Presiden di Ankara menegaskan tekad MGK untuk mempertahankan tindakan guna menanggulangi kegiatan organisasi teroris dan pendukungnya yang bertujuan merusak kepercayaan dan perdamaian, serta solidaritas, persatuan dan ketenangan masyarakat Turki. MGK juga membahas berbagai tindakan yang diambil pasukan keamanan Turki guna memelihara keamanan dan kedamaian serta ketenangan di Turki. Meskipun pada akhirnya, melalui pernyataan

pimpinan militer Turki tanggal 23 Februari 2008 operasi militer dibatasi dan tentara-tentara kembali ke Turki.

Potensi konflik lain adalah intervensi asing dalam masalah Turki-Kurdi. Karena masalah dengan etnis Kurdi melibatkan juga kepentingan beberapa negara lain yang berbatasan dengan Turki. Konflik-konflik etnis yang berawal dari penguasaan sumber daya alam, sangat mudah mengundang masuknya intervensi asing. Apalagi masalah yang melibatkan wilayah Kurdistan yang diyakini memiliki sumber minyak dan air yang melimpah. Di satu sisi, intervensi asing dapat berguna sebagai pihak yang netral untuk mendorong perdamaian, namun di sisi lain pihak asing justru dapat menambah potensi konflik yang telah ada.

Misalnya ketika PKK makin menggencarkan serangan terhadap Turki di tahun 2002, afiliat PKK di Iran yaitu Partai untuk Kehidupan Bebas Kurdistan (PJAK) pun mulai aktif menyerang kepentingan militer Iran sejak 2005. PJAK dipercayai dibiayai Washington. Hal ini bisa menjadi penjelasan mengapa Washington, yang sudah memasukkan PKK di dalam daftar organisasi teroris, berusaha keras untuk menangani PKK melalui jalur diplomasi maupun operasi rahasia. Karena itu, Ankara menganggap upaya Washington tidak sungguh-sungguh sehingga Turki harus mengambil inisiatif sendiri. Apalagi Ankara tak mau dianggap sebagai penonton bila kepentingan regionalnya terganggu.

Bukan kali ini saja Turki berseberangan dengan AS. Ketika Gedung Putih memutuskan untuk menginvasi Irak tahun 2003, Ankara menolak Washington menggunakan pangkalan militer Turki. Padahal Turki adalah anggota NATO. Tetapi Ankara juga tidak ingin ada gejolak besar dalam hubungannya dengan Washington sehingga bantuan kecil dan terbatas tetap diberikan.

Namun ketika terjadi konflik di Irak Utara yang berbatasan dengan Turki Tenggara, Washington justru seperti menutup mata dengan kondisi di Irak Utara dan kemungkinan konflik lain yang bakal muncul. Ini dikarenakan kemelut yang terus terjadi antara kaum Sunni dan Syiah di Irak. Baghdad sendiri membiarkan situasi di Irak Utara karena Kurdi merupakan faktor

penting dalam sistem bagi kuasa di pemerintahan Irak. Dan jika federalisme Irak menjadi kenyataan, Irak Utara bakal merubah peta politik yang ada. Turki tak punya pilihan selain memastikan bahwa solidaritas Kurdi tidak mempengaruhi Kurdi di Turki dan otonomi Kurdi di Irak Utara tidak melebar.

AS telah menyatakan PKK adalah ancaman bagi Turki, Irak dan Amerika Serikat, dan telah menyampaikan dukungan bagi Turki untuk melancarkan serangan terhadap sasaran PKK di Irak Utara. Militer Turki telah melancarkan beberapa serangan lintas perbatasan guna memerangi pemberontak PKK, yang menggunakan Irak utara sebagai landasan serangan terhadap Turki.

Menanggapi konflik yang muncul di Irak Utara, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Sean McCormack, pada Selasa tanggal 19 Februari 2008, menyatakan bahwa AS akan terus bekerjasama dengan pemerintah Turki dan militer Turki guna menyediakan keterangan intelijen terbaik sehingga PKK yang beroperasi di wilayah Irak dapat ditangani.

PKK yang didaftar oleh Amerika Serikat dan Turki sebagai kelompok teroris telah mengangkat senjata guna menentang Turki sejak tahun 1984 dengan tujuan mendirikan negara suku di bagian tenggara Turki. Sampai akhir Februari 2008 telah lebih dari 30.000 orang telah tewas dalam konflik itu.

Meskipun akan bekerjasama dengan pemerintah Turki dan militer Turki guna menyediakan keterangan intelijen terbaik sehingga PKK yang beroperasi di wilayah Irak dapat ditangani tetapi Amerika Serikat (AS) tetap khawatir mengenai rencana serangan militer Turki karena dinilai akan mengganggu stabilitas di Irak Utara. Parlemen Irak juga mengecam hal ini. Bahkan Presiden Irak, Jalal Talabani, menolak untuk menyerahkan pemimpin PKK. Karena para pemimpin PKK di Irak berada di wilayah yang dikuasai kelompok Kurdi yang daerahnya bergunung-gunung, sehingga sulit untuk dijangkau.

Parlemen Irak juga mengecam ancaman penggunaan kekuatan militer di Irak Utara untuk menyelesaikan sengketa yang ada. Persetujuan parlemen Turki terhadap pemerintah untuk menggunakan kekuatan militer mencerminkan tidak adanya keinginan agar hubungan antara kedua negara

tetap baik. Parlemen Irak mendesak pihak Ankara bertindak bijaksana. Parlemen Irak juga mendesak pemerintah Turki melakukan koordinasi dengan pemerintah Irak untuk menyelesaikan krisis yang terjadi antara Turki dengan Kurdi.

Berbagai tipe dan potensi konflik di atas tidak dapat dilepaskan dari adanya faktor konflik laten yang ada di Turki.

5.5.2 Konflik Laten

Setengah dari populasi etnis Kurdi di dunia, yakni 10-12 juta orang diperkirakan tinggal di Turki. Etnis Kurdi juga tersebar di Irak, Iran, dan Suriah.

Persoalan Kurdi merupakan masalah yang sangat sulit bagi Turki, Irak dan negara lain yang memiliki populasi etnis Kurdi cukup signifikan. Karena Kurdi adalah suku yang punya adat istiadat sendiri. Mereka tidak punya wilayah dan hidup nomaden. Populasi terbesarnya berada di Turki. Kurdi di Turki menjadi basis masyarakat Islam, dan juga menjadi semacam perlawanan bagi pemerintah Turki yang sekuler.

Aspirasi etnis Kurdi berupa hak untuk menggunakan bahasa mereka, hak untuk mempublikasikan bahasa mereka, hak untuk menyiarkan dan menerima pendidikan dalam bahasa mereka, pembangunan ekonomi, hak atas partisipasi politik sebagai kelompok yang berbeda, otonomi budaya, federasi, dan lebih ekstrim lagi kedaulatan. Aspirasi-aspirasi seperti inilah yang juga bisa menjadi konflik laten.

Kesetiaan terhadap etnis, meskipun jarang terjadi namun cukup menjadi kekuatan bagi sumber terjadinya pergerakan sosial. Ia akan menjadi sumber kekuatan mobilisasi yang tidak terkontrol apalagi jika dihubungkan dengan faktor lain. Ia akan termiliterisasi melawan kesetiaan terhadap negara dan akan menjadi kerajaan terhadap kedaulatan suatu negara-bangsa.

Interaksi antara kota dengan berbagai elemen berbeda yang dimilikinya, masyarakat pedesaan dengan berbagai aspeknya yang meluas menjadi kota dan meluas lagi menjadi konglomerasi yang secara simultan geografis, politis, ekonomi dan sosial sama. Konglomerasi lah yang menjadi

kunci kebijakan Kurdistan dan salah satu alasan terjadinya radikalisme terhadap politik Kurdi yang kemudian berubah menjadi nasionalisme.

Perjuangan etnis Kurdi terhadap berbagai tekanan dari rezim berkuasa di Turki yang secara resmi melarang penggunaan bahasa dan nama-nama Kurdi dimulai tahun 1984 ketika PKK mengumumkan perang gerilya untuk merespons gelombang tekanan setelah pecah kudeta militer Turki pada 1980. AS dan Uni Eropa melabeli PKK sebagai organisasi teroris. Departemen Luar Negeri AS menuding PKK bertanggung jawab atas pembunuhan lebih dari 30.000 warga sipil Turki dan anggota militernya.

Pejuang PKK telah melancarkan perlawanan terhadap Pemerintah Turki lebih dari dua dekade untuk menuntut pendirian wilayah otonomi Kurdi. Pemimpin PKK Abdullah Ocalan dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara Turki. PKK menuduh Turki menekan budaya dan wilayah permukiman etnis Kurdi.

Para pejabat militer mengatakan bahwa sebagian besar anggota PKK -- antara 3.500 dan 3.800 -- bermarkas di Irak utara, dengan sebanyak 2.000 anggota yang lain ada di Turki. Dengan jumlah pemberontak yang demikian maka konflik laten mudah terjadi karena dapat diakomodir dengan cepat dalam melaksanakan aksinya.

5.5.3 Konflik Nyata

Konflik nyata telah dimulai sejak tahun 1984 yaitu ketika PKK mengumumkan perang gerilya terhadap Turki. PKK terus melakukan perjuangan bersenjata terhadap pemerintah Turki.

Tahun 1984 di kota Bitlis, wilayah dimana terjadi pertempuran besar dan tempat dimana terjadi pembantaian terburuk terhadap jurnalis Kurdi terjadi.

Pada tahun 2003 KADEK memutuskan untuk membubarkan diri. Sebagai gantinya berdiri Konferensi Rakyat Kurdistan (KHK) yang kembali ke cita-cita awal PKK. KHK/PKK lantas menghidupkan kembali perjuangan bersenjata sebagai cara untuk memulihkan kredibilitas di mata rakyat Kurdi

sekaligus taktik untuk menekan Turki. PKK dan organisasi sempalannya lantas merebak dan semakin militan dalam serangan.

Awal bulan Juli 2005, PKK menculik seorang tentara Turki dan juga melakukan serangan bom di daerah wisata populer yang akhirnya menewaskan lima orang termasuk wisatawan asing. Konflik Kurdi di Turki telah menewaskan 37.000 orang sejak tahun 1984 ketika PKK mengangkat senjata melawan Ankara untuk memperjuangkan pemerintah sendiri Kurdi.

Dalam pertengahan tahun 2005 (Juli 2005) PKK meningkatkan serangan-serangan terhadap tentara Turki di tenggara setelah menghentikan gencatan senjata yang telah berlangsung lima tahun dengan alasan reformasi oleh Ankara untuk memperluas kemerdekaan Kurdi tidak memadai.

Pada Kamis tanggal 28 Juli 2005, para pemberontak Partai Pekerja Kurdistan (PKK) menculik seorang walikota distrik Yayladere di Propinsi Bingol di Turki Tenggara, Hasim Akyurek. Walikota diculik pada Rabu petang ketika sedang melancong di sebuah daerah pegunungan wilayah itu. Akyurek sendiri merupakan etnik Kurdi yang merupakan anggota Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang sedang berkuasa.

Ketua cabang AKP propinsi itu, Yusuf Coskum mengemukakan kepada kantor berita Anatolia bahwa walikota pertama dibawa ke desa terdekat dan kemudian ke satu lokasi yang tidak diketahui. Tidak ada pernyataan tentang motif dari penculikan itu. PKK meningkatkan serangan-serangan terhadap tentara di tenggara dalam beberapa bulan di pertengahan tahun 2005 setelah menghentikan gencatan senjata sepihak yang berlangsung lima tahun sejak Juni 2004 dengan alasan reformasi oleh Ankara untuk memperluas kemerdekaan Kurdi tidak memadai.

Seiring dengan penggerusan kelompok Kiri oleh Turki, PKK membentuk milisi bersenjata dengan nama Tentara Pembebasan Rakyat Kurdistan, *Arteshen Rizgariya Gelli Kurdistan* (ARGK). PKK sejak awal berusaha menerapkan Stalinisme dalam pemikiran politik dan militer. Sejak 1984, PKK aktif melakukan gerakan bersenjata dengan bermarkas di pegunungan antara Turki dan Irak Utara. Sampai Juni 2007, sekitar 5000 pasukan PKK bermukim di utara Irak.

Ketika Uni Soviet bubar, PKK bertransformasi menjadi gerakan militan yang lebih terbuka untuk lebih mengakomodasi nasionalisme dan islamisme. Bendera berlambang palu arit pun berganti dengan simbol obor. Konflik bersenjata malah justru memuncak. PKK makin meningkatkan serangan bom, termasuk bom bunuh diri, sedang Turki membentuk regu pembunuh (*death squad*) untuk menghabisi para petinggi dan simpatisan PKK. Hingga tahun 2007 korban tewas sudah mencapai sekitar 37 ribu orang.

Pertempuran yang terjadi Sabtu tengah malam tanggal 20 Oktober 2007, kelompok Kurdi dalam jumlah besar melakukan penyusupan dan serangan terhadap tentara Turki dari Irak Utara. Menanggapi hal ini, pemerintah Turki berjanji akan melakukan tindakan tegas terhadap kelompok Kurdi. Pernyataan ini disampaikan menyusul kontak senjata antara militer Turki dan kelompok Kurdi yang menewaskan 12 tentara Turki dan 23 orang Kurdi. Sedangkan 16 lainnya mengalami luka-luka akibat baku tembak yang terjadi di Desa Daglica, Provinsi Hakkari, di daerah perbatasan Irak-Turki. Pertempuran terus terjadi dan tentara Turki menggunakan helikopter untuk melakukan perlindungan

Pernyataan itu juga mengungkapkan pasukan Turki terus memantau rute yang dilalui pasukan kelompok Kurdi untuk lolos dari kejaran. Pasukan Turki juga melakukan serangan artileri ke sekitar 63 target. Dalam serangan tersebut sepuluh warga sipil terluka.

Presiden Turki Abdullah Gul, Perdana Menteri, Recep Tayyip Erdogan, sejumlah menteri dan pemimpin militer melakukan pertemuan pada Minggu tanggal 21 Oktober 2007 untuk membahas tindakan tegas yang akan ditempuh menyusul terjadinya pertempuran tanggal 20 Oktober 2007. Perdana Menteri Erdogan menegaskan bahwa pemerintah Turki akan menggunakan persetujuan parlemen yang diperoleh pada Rabu tanggal 17 Oktober 2007 untuk melakukan serangan militer terhadap kelompok Kurdi yang tergabung dalam Kurdistan Worker Party (PKK) yang berbasis di Irak Utara yang berbatasan dengan Turki.

Awal November 2007 menjadi permulaan serangan Turki ke Irak Utara. Pesawat tempur Turki resmi memasuki wilayah Irak dan menyerang

daerah yang diyakini merupakan posisi gerilyawan separatis Partai Pekerja Kurdistan (PKK). Dua helikopter tempur menembaki beberapa lokasi di daerah pegunungan dekat kota Zakhu, Irak. Turki telah menempatkan lebih dari 100 ribu pasukannya di perbatasan Turki-Irak lengkap dengan sejumlah jet tempur F-16 dan helikopter tempur. Dalam kebijakan ini parlemen sudah merestui serangan dan hal ini sesuai dengan pernyataan Presiden Turki Abdullah Gul bahwa masalah PKK akan diselesaikan oleh tentara dan bukan diplomat.

Turki tak bisa lagi mentolerir serangan terbatas tetapi meningkat dari PKK. Tanda-tanda itu tampak pada serangan gerilyawan ke unit komando Turki di pegunungan Gabar tanggal 7 Oktober 2007. Seteru senjata ini menewaskan 13 tentara Turki. Ini merupakan korban militer terbesar yang dialami Ankara sejak satu dekade lalu. Serangan mendadak ini melibatkan sekitar 50 militan PKK yang merupakan jumlah pasukan terbesar dalam satu serangan sejak 2002.

Serangan pada 21 Oktober dengan melibatkan sekitar 200 gerilyawan bersenjata PKK meningkatkan eskalasi konflik. Sasaran PKK adalah markas tentara Turki di Daglica, sekitar lima kilometer dari perbatasan Turki-Irak. Markas kecil ini dijaga 50 pasukan Turki. PKK sudah merencanakan serangan ini secara matang. Sekitar 12 tentara terbunuh oleh militan yang memiliki perlengkapan militer canggih seperti teropong malam dan alat pengindera panas.

Serangan Turki terhadap PKK di kawasan Irak Utara bukan semata ditujukan untuk menghabisi gerilyawan PKK. Turki ingin memberikan pesan bahwa Ankara adalah faktor penting yang mesti diperhitungkan dalam percaturan politik Timur Tengah. Terlebih lagi, Turki ingin memulihkan kawasan Irak Utara sebagai wilayah pengaruh yang pernah dipegangnya selama masa diktator Saddam Hussein berkuasa di Irak.

Pada tanggal 22 Februari 2008, pasukan Turki melancarkan serangan darat memasuki jauh ke dalam wilayah Irak untuk memburu pemberontak separatis Kurdi. Aksi ini mencerminkan peningkatan secara dramatis konflik Turki dengan militan Kurdi. Laporan ini merupakan penegasan pertama

mengenai operasi darat oleh militer Turki sejak invasi AS yang menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein di Irak. Kejadian ini meningkatkan kecemasan bahwa situasi itu dapat memicu konflik lebih luas dengan Kurdi-Irak yang didukung AS, meski Turki menjamin bahwa serangannya itu hanya ditujukan pada sasaran Partai Pekerja Kurdi (PKK).

Pengumuman tentang serangan darat yang dilakukan Turki merupakan satu perkembangan besar dalam konflik antara Turki dan Kurdi, dimana konflik yang dimulai sejak tahun 1984 dan sampai awal bulan Februari 2008 telah memakan korban 40.000 jiwa.

Jurubicara PKK Ahmad Danas menyatakan bahwa dua tentara Turki tewas dan delapan cedera dalam bentrokan pada tanggal 22 Februari 2008 di sepanjang perbatasan 385 kilometer. Namun pernyataan ini tidak mendapat tanggapan dari militer Turki.

Berdasarkan pengumuman dari pimpinan militer Turki yang pernyataannya disiarkan di halaman internet resmi, pasukan Turki menyeberang ke wilayah Irak pada Kamis malam tanggal 21 Februari 2008 dalam operasi yang bertujuan menghancurkan pangkalan pemberontak Kurdi di wilayah pegunungan. Tentara Turki menyeberang perbatasan sekitar pukul 19:00 waktu setempat pada Kamis malam tanggal 21 Februari 2008, setelah sehari sebelumnya melancarkan serangan udara dengan target pemberontak PKK.

Pada Kamis tanggal 21 Februari 2008, Turki membom posisi pemberontak Kurdi di Irak utara dengan menggunakan senjata artileri. Pesawat tempur Turki telah terbang pada malam hari hingga dinihari Kamis tanggal 21 Februari 2008 di beberapa daerah di Irak utara, termasuk Safa Qandil, Qalit Duza, Zarwa, Sinsakir dan Raniya. Hal ini dinyatakan Uni Patriotik Kurdistan di Irak (PUK) di halaman internetnya.

Militer Turki tidak mengkonfirmasi laporan tanggal 21 Februari 2008 tersebut, tapi dalam pernyataan yang disiarkan Kamis malam tanggal 21 Februari 2008 oleh Dewan Keamanan Nasional (MGK) menyatakan "operasi lintas perbatasan" yang dilakukan Turki dilanjutkan.

Pada konflik tanggal 23 Februari 2008, korban yang tewas dalam serangan darat ke markas gerilyawan Kurdi adalah lima tentara Turki, yang

kemudian dikirim menggunakan pesawat militer di Kota Van. Namun militer Turki mengklaim telah menewaskan sedikitnya 79 gerilyawan Kurdi pada penyerbuan di wilayah Irak Utara dalam tiga hari ini.

Serangan besar-besaran ribuan tentara Turki tanggal 23 Februari 2008 telah melumpuhkan kekuatan gerilyawan Kurdi di perbatasan Turki-Irak. Pernyataan pejabat militer Turki tanggal 23 Februari 2008 menyatakan pertempuran sengit di wilayah Irak utara itu telah menewaskan sedikitnya 79 anggota gerilyawan Partai Pekerja Kurdi (PKK) dan lima tentara Turki. Di lain pihak, Pemerintah Irak tidak yakin operasi militer yang digelar tiga hari berturut-turut ini akan efektif menyelesaikan konflik Kurdi-Turki. Serangan darat ini dilakukan menyusul serangan udara yang telah dilancarkan dua hari sebelumnya di zona perang di Irak Utara.

Kontak senjata pasukan Turki dengan gerilyawan PKK tanggal 23 Februari 2008 terjadi di Al-Amadiyah, kota di pegunungan yang berjarak sekitar 10 kilometer dari perbatasan di Irak utara. Sebanyak 24 pemberontak Kurdi tewas karena serangan artileri dan helikopter. Pertempuran tidak seimbang tersebut terjadi sekitar pukul 06.00 waktu setempat dan berlangsung selama dua jam.

Penduduk desa di Al-amadiyah menyatakan peperangan dengan berbagai senjata artileri telah berlangsung sejak Jumat malam tanggal 22 Februari 2008. Senjata otomatis dikerahkan di daerah Hakurk dan Sidekan yang berbatasan langsung dengan Kota Cukurca di Turki. Pesawat tempur dan helikopter pun dikerahkan.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Irak mendukung upaya militer Turki tanggal 22 Februari 2008 untuk menggempur wilayah yang diyakini jadi markas gerilyawan PKK. Untuk mengejar posisi milisi, tentara Turki telah masuk 10 km ke wilayah Irak.

Bentrokan hebat terjadi lagi pada Selasa, tanggal 26 Februari 2008 antara militer Turki melawan pemberontak Kurdi. Dalam pertempuran itu, pasukan Turki berhasil membunuh 77 pemberontak Kurdi. Baku tembak yang terjadi di kota perbatasan Iraq-Turki, Cukurca, tersebut juga menewaskan lima anggota pasukan Turki.

Berdasarkan keterangan juru bicara militer Turki, akibat dari bentrokan tanggal 26 Februari 2008 adalah total pemberontak yang tewas selama operasi militer itu mencapai 230 orang. Sedangkan anggota militer Turki yang meninggal 27 orang berikut tiga penjaga desa pro pemerintah juga terbunuh dalam operasi tersebut.

Anggaran untuk aktivitas PKK bukan tak sedikit. Setahun dana yang dipergunakan mencapai 86 juta dolar dan didapat sebagian besar dari perdagangan narkoba. Sekitar 80 persen narkoba di Paris diyakini berasal dari tangan PKK.

Dalam rangka menghentikan konflik yang terjadi dapat berupa manajemen konflik yang diatur yaitu ketika terdapat usaha untuk menghindari *force* dan ancaman atau manajemen konflik yang tidak diatur dimana rentan terhadap penggunaan *force*. Hal ini dilakukan agar terdapat jalan keluar terhadap konflik yang terjadi.

5.5.4 Manajemen Konflik

Manajemen konflik yang tidak diatur rentan terhadap penggunaan *force*. Ini dilakukan pemerintah Turki untuk menghentikan secara paksa konflik yang terjadi dengan etnis Kurdi. Misalnya, ketika terjadi konflik di bulan Februari 2008, Menteri Luar Negeri Turki Ali Babacan mengeluarkan pernyataan seiring banyaknya kritik mengenai efektivitas operasi militer Turki di Irak Utara untuk menghentikan perjuangan PKK yang menuntut wilayah otonomi. Babacan menjamin Turki akan menjaga penuh integritas perbatasan Irak dan kesatuan politik. Namun, Pemerintah Irak justru tidak yakin permasalahan Kurdi akan selesai dengan serangan besar-besaran. Ribuan tentara Turki tanggal 23 Februari 2008 telah melumpuhkan kekuatan gerilyawan Kurdi di perbatasan Turki-Irak. Pejabat militer Turki dalam pernyataannya menegaskan, pertempuran sengit di Irak Utara telah menewaskan sedikitnya 79 anggota gerilyawan Partai Pekerja Kurdi (PKK) dan lima tentara Turki. Namun, pemerintah Irak tidak yakin operasi militer tiga hari berturut-turut itu akan efektif menyelesaikan konflik Kurdi-Turki.

Menanggapi upaya militer yang dilakukan Turki tanggal 22 Februari 2008, Presiden Pemerintahan Daerah Kurdi dalam pernyataannya menyatakan serangan Turki menimbulkan korban sipil Kurdi. Mereka juga menyatakan wilayah Kurdi yang jadi sasaran serangan di luar kontrol mereka. Namun, Pemerintah Turki menyatakan serangan yang mereka lakukan sudah tepat sasaran. Seperti apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan bahwa target, tujuan, ukuran dan parameter yang digunakan dalam operasi tanggal 22 Februari 2008 itu dibatasi kepada PKK. Menteri Luar Negeri Turki Ali Babacan menyatakan bahwa kesuksesan pelumpuhan markas pemberontak Kurdi menunjukkan ke negara-negara Barat dan Irak bahwa operasi militer saat itu mencapai hasil yang memuaskan dibandingkan beberapa tahun lalu.

Serangan darat di Irak Utara dilakukan menyusul serangan udara yang telah dilancarkan dua hari sebelumnya di zona perang di Irak Utara. Kontak senjata pasukan Turki dengan gerilyawan PKK terjadi di Al-Amadiyah, kota di pegunungan sekitar 10 kilometer dari perbatasan di Irak Utara. Sebanyak 24 pemberontak Kurdi tewas karena serangan artileri dan helikopter.

Pertempuran tidak seimbang tersebut terjadi sekitar pukul 06.00 waktu setempat dan berlangsung selama dua jam. Penduduk desa setempat mengatakan peperangan seru dengan berbagai senjata alteri telah berlangsung sejak Jumat, 22 Februari 2008 malam. Mereka mendengar suara keras dari senjata otomatis di daerah Hakurk dan Sidekan yang berbatasan langsung dengan Kota Cukurca di Turki. Pesawat tempur dan helikopter pun hilir mudik melepaskan rudal sepanjang malam.

Berdasarkan laporan militer Turki, saat terjadinya konflik tanggal 22 Februari 2008 milisi Kurdi hanya menggunakan senjata laras panjang. Tentara Turki sudah menjelajah pegunungan bersalju sejak Jumat (22/2). Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Irak mendukung upaya militer Turki menggempur wilayah yang diyakini jadi markas gerilyawan PKK. Untuk mengejar posisi milisi, tentara Turki telah masuk 10 km ke Irak.

Menanggapi operasi militer Turki ke wilayah Kurdi di Irak Utara, pada tanggal 26 Februari 2008 parlemen Kurdi memberi mandat kepada pasukan

militer Kurdi, *peshmerga*, untuk melancarkan serangan balasan terhadap pasukan Turki. Ini dimaksudkan guna melindungi wilayah dan rakyat Kurdi dari serangan pasukan Turki. Selain menyetujui dilancarkannya serangan balasan, parlemen Kurdi juga menuntut Pemerintah Turki memberikan ganti rugi kepada Pemerintah Kurdi atas kerusakan yang timbul akibat operasi militer Turki.

Pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2008, demonstran pro kelompok Kurdi di Van, bentrok dengan polisi saat berunjuk rasa menentang operasi militer yang dilakukan Pemerintah Turki terhadap kelompok Kurdi. Unjuk rasa yang semula berjalan tertib berubah anarkis ketika para pengunjuk rasa melempari polisi dengan batu. Polisi kemudian membalas dengan memukul para demonstran dengan tongkat dan menghalau mereka dengan meriam air. Bentrokan pecah sesaat setelah pengunjuk rasa membacakan pernyataan sikap yang intinya menyalahkan militer Turki.

Manajemen konflik teratur terjadi ketika pemerintah Turki berusaha menghindari penggunaan *force* dan ancaman dalam menyikapi konflik yang ada dengan etnis Kurdi.

Turki berada di atas angin ketika Abdullah Ocalan berhasil ditangkap tahun 1999. Sampai 1998 Ocalan berdiam di Suriah, Ankara berhasil menekan Damaskus sehingga Apo terpaksa berpindah-pindah dari Rusia, Italia, dan Yunani. Suriah dan Yunani diyakini merupakan pendukung PKK. Apo ditangkap ketika keluar dari Kedutaan Yunani di Kenya melalui operasi CIA untuk lalu diekstradisikan ke Turki.

Setelah dipenjarakan di Turki sampai sekarang, Apo berupaya mencapai penyelesaian damai dengan Turki. PKK juga merubah tuntutananya dari kemerdekaan Kurdi menjadi otonomi dalam negara Turki pada Maret 1993. Selain karena Ocalan, bisa jadi ini disebabkan oleh hancurnya pusat-pusat pelatihan gerilya PKK di Irak Utara dan kekalahan dari pertempuran dengan organisasi rival dari Kurdi Irak yang didukung militer Turki.

Hari Jumat tanggal 19 Agustus 2005, Partai Pekerja Kurdistan (PKK) menyerukan satu pernyataan yang meminta pemberlakuan gencatan senjata

sepihak selama satu bulan dengan Ankara hingga 20 September 2005. Kongra-Gel, sebagai sayap politik PKK, dalam pernyataannya mengatakan bahwa gencatan senjata diserukan untuk membuka jalan menuju perundingan. Pihak berwenang Turki tidak mengabaikan pernyataan tersebut karena mempertimbangkan PKK sebagai organisasi teroris.

PKK yang terdaftar sebagai kelompok teroris oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa meningkatkan kekerasannya selama pertengahan tahun 2005 karena PKK telah menyerukan berakhirnya gencatan senjata yang ada sejak bulan Juni 2004 dengan alasan langkah-langkah Ankara untuk memperluas kemerdekaan Kurdi belum memadai. PKK sebelumnya menyatakan akan mempertimbangkan satu gencatan senjata baru jika tentara Turki juga menghentikan operasi militer yang dilancarkan terhadap kelompok pemberontak

Pemerintah Turki terlihat menahan diri dalam 6 bulan pertama konflik di tahun 2007 meskipun telah tercatat sekitar 50 tentara Turki tewas. Partai Pekerja Kurdi (PKK) di kawasan Irak Utara yang berbatasan dengan Turki dituduh sebagai penyebabnya. Tidak ada sikap atau tindakan apapun untuk mengendalikan situasi tersebut. Namun setelah korban tentara bertambah 30 orang lagi, pemerintah Turki akhirnya merancang serangan untuk memerangi PKK. Rancangan ini telah dibawa ke parlemen Turki untuk mendapatkan dukungan. Juru bicara pemerintah Turki, Cemil Cicek menyatakan bahwa target adalah hanya PKK. Tujuan pemerintah Turki untuk menyerang kawasan Utara Irak adalah agar kawasan tersebut dan bagian lain Turki bisa segera damai dan tenang. Mandat parlemen yang diturunkan hanya akan memberikan kewenangan untuk menugaskan militer melakukan operasi lintas batas negara.

Irak memiliki banyak kepentingan untuk tidak menyetujui operasi militer Turki karena suku Kurdi yang menjadi target operasi Turki adalah yang berada di wilayah Utara Irak. Dan hal ini bisa dianggap invasi terhadap negara tetangga. Selain itu, ini juga berarti bahwa Irak tidak dapat menyelesaikan persoalan di dalam negaranya sendiri sehingga harus melibatkan Turki untuk menyelesaikan masalah Kurdi. Irak sendiri pasca invasi Amerika, kondisinya

masih belum bisa dibilang normal. Konflik bersenjata tambahan di Utara Irak, tentu akan menambah kekacauan di Irak.

Dalam usaha penyerangan ke kawasan Utara Irak, Turki mengalami hambatan-hambatan geografis karena daerah yang dituju merupakan daerah pegunungan. Keadaan ini justru akan membuat Turki kehilangan kendali atas situasi politiknya sendiri, karena penyerangan tersebut akan menghabiskan sumber daya yang cukup besar untuk masalah yang masih bisa diatasi melalui jalur diplomasi. Efek globalnya akan mempengaruhi stabilitas Turki dan negara-negara lain yang juga berbatasan. Kurdi belum mendapat pengakuan sebagai suatu wilayah sendiri, sehingga kepentingan Kurdi dapat disalahgunakan oleh negara lain.

Penghentian konflik dilaksanakan kedua pihak dengan menghentikan serangan dalam konflik dan berusaha menjalin hubungan kembali diantara mereka melalui cabang politik maupun ekonomi.

Turki harus menemukan cara untuk menyatukan elemen-elemen budaya dan identitas Kurdi ke dalam ideologi negara Turki, karena masalah Kurdi merupakan masalah yang sulit diatasi karena belum ada pemerintah yang bisa memaknai seperti apa pergerakan nasionalis atas dasar aspirasi budaya dengan keinginan bagi otonomi lokal. Sebagian pihak pemerintah Turki memaknai ancaman tersebut sebagai terorisme dan perlu diberi perhatian atas adanya dinamika sosial dan ekonomi yang muncul.

Sekjen PBB Ban Ki-moon memberikan perhatian penuh terhadap perang yang semakin memanas di perbatasan Irak-Turki. Dia menyarankan Turki segera menghentikan serangan sejalan dengan dilakukannya operasi militer Turki terhadap Kurdi tanggal 22 Februari 2008. Melalui juru bicaranya di Gedung Putih, Scott Stanzel, Pemerintah AS juga menyarankan agar Pemerintah Turki membatasi operasi militer dengan target PKK, pembatasan wilayah, dan waktu operasi militernya. Sedangkan dari Brussel, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Javier Solana menilai serangan militer yang dilakukan Turki bukan respons yang tidak baik.

Inggris menilai Turki terlalu dini menggunakan kekuatan senjata untuk mengatasi problem Kurdi karena akan menimbulkan jatuhnya korban sipil.

Jerman memperingatkan Ankara bahwa operasi militer hanya akan memicu ketidakstabilan regional. Meski telah digempur habis-habisan oleh sekitar 3.000 hingga 10.000 tentara Turki, gerilyawan PKK menyatakan akan melakukan serangan balasan.

Harian Jerman *Süddeutsche Zeitung* yang terbit di München menyatakan bahwa Turki memiliki hak untuk membela diri terhadap serangan teroris PKK. Namun Ankara harus membarengi ancaman militer dengan pendekatan politik dan diplomasi.

Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Robert Gates yang mengunjungi Turki setelah mengunjungi India menanggapi bentrokan yang terjadi tanggal 26 Februari 2008 mengungkapkan bahwa pemimpin-pemimpin Turki harus menyelesaikan operasi militer mereka di Iraq secepatnya tidak lebih dari seminggu. Paling lama dua minggu. Gates juga meminta Turki mengajukan komplain kepada Kurdi. Salah satu usul yang dikeluarkan Gates adalah permasalahan diselesaikan dengan cara mengubah serangan bersenjata menjadi proyek ekonomi serta politik.

5.6 Prospek Hubungan Pemerintah Turki dengan Etnis Kurdi

Pengelolaan konflik bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi pihak-pihak yang terlibat. Salah satu cara untuk mengelola konflik adalah dengan cara menerapkan strategi untuk mengeliminir konflik laten dan konflik di permukaan yang mungkin muncul, seperti apa yang disampaikan oleh Simon Fisher dkk di Bab II.

Antara tahun 1984 dan 1999, korban jiwa yang meninggal sekitar 37 ribu orang ketika PKK memimpin aksi serangan bersenjata guna mewujudkan otonomi Kurdi di Turki tenggara. Pengumuman Kongra-Gel muncul setelah Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan membuat janji penting pada pertengahan Agustus 2005 untuk menyelesaikan konflik Kurdi dengan cara yang lebih demokratis.

Pengumuman gencatan senjata dilontarkan dalam satu jumpa pers oleh pemimpin pemberontak Kurdi dan kepala Kongra-Gel Zubayir Aydar tapi

penjelasan singkat akhirnya dibatalkan pada saat-saat terakhir karena adanya tekanan Turki terhadap pihak berwenang Belgia. Seorang diplomat senior Turki hari Kamis tanggal 18 Agustus 2005 menyatakan bahwa Ankara sebelumnya meminta Belgia menangkap Aydar, yang mendapat status sebagai pengungsi politik di Swiss sejak 1994.

Pada tanggal 12 Juni 2007, kelompok PKK di Turki menawarkan gencatan senjata pada pemerintah Turki jika mereka setuju untuk mengakhiri operasi tentara terhadap PKK.

PKK yang didaftar sebagai organisasi teroris oleh Ankara dan banyak dari masyarakat internasional menyerukan gencatan senjata sepihak pada 1 Oktober 2007 dan mengharapkan hal itu akan menjadi jalan bagi pembicaraan untuk memecahkan konflik.

Gencatan senjata pada tanggal 1 Oktober 2007 ditolak oleh Turki, seperti halnya gencatan senjata sebelumnya yang diminta oleh PKK. PKK mengangkat senjata untuk memperoleh pemerintahan sendiri bagi etnis Kurdi di bagian tenggara Turki sejak tahun 1984. Konflik itu telah menewaskan lebih dari 37.000 orang.

Berdasarkan teori-teori Simon Fisher mengenai bagaimana cara mengelola konflik maka sasaran-sasaran yang akan dicapai adalah dengan meningkatkan komunikasi, toleransi, dialog serta pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas. Konflik laten yang sifatnya tersembunyi seringkali muncul dalam batasan-batasan etnisitas. Dan konflik laten harus selalu diwaspadai karena sangat mudah mewujudkan konflik.

Ada beberapa perubahan kebijakan ketika Abdullah Gul menjadi Presiden Turki di tahun 2007. Berbeda dengan para pendahulunya yang mengedepankan kekerasan dalam mengatasi separatisme, Perdana Menteri Tayyip Erdogan mendobrak banyak tabu politik. Erdogan dan pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) membuka lebih banyak kesempatan bagi ekspresi kebebasan etnis Kurdi di Turki. Erdogan pula yang pertama kali melemparkan wacana “masalah Kurdi” ke publik di saat membicarakan hal itu di haramkan pelaku politik Turki.

AKP juga mengaku sebagai representasi politik terbaik bagi kaum Kurdi. AKP memiliki anggota dan dukungan terbesar dari warga Kurdi ketimbang partai-partai Turki lain. Pemerintahan AKP juga memperbolehkan kemunculan koran, radio, dan televisi berbahasa Kurdi.

Kebijakan AKP diarahkan untuk mengakomodasi perbedaan daripada menghapus perbedaan dalam baju keseragaman yang telah lama menjadi pendekatan resmi pemerintah Turki sejak berdirinya republik tersebut. Konsekuensinya, AKP berseberangan langsung dengan kebijakan militer. Daftar ketidaksukaan militer terhadap AKP makin menumpuk di atas masalah ekspresi religius para politisinya yang membuat risih tentara yang fundamentalis sekular.

Selain itu, AKP melihat bahwa separatisme Kurdi lebih disebabkan karena ketimpangan ekonomi. Oleh sebab itu Erdogan menerapkan kebijakan berorientasi kemakmuran sebagai langkah memastikan kesuksesan politik jangka panjang. Investasi pun lalu dipompa ke daerah tertinggal, termasuk kawasan Kurdi di tenggara Turki.

Hasil kasat mata adalah berlimpahnya restoran cepat saji dan pusat perbelanjaan berbarengan dengan pembangunan infrastruktur, seperti jalan bebas hambatan empat jalur. Sedangkan Diyarbakir, ibukota tak resmi kaum Kurdi di Turki, mencerminkan keberhasilan kebijakan AKP ini dalam bentuk perbaikan kesejahteraan dan kemiskinan yang menyebabkan konflik berlangsung lama.

Dan di pemilu terakhir, AKP menuai hasilnya dengan perolehan suara terbesar di kawasan Kurdi. Sampai-sampai partai etnis Kurdi, Partai Masyarakat Demokratis (DTP) kalah di lumbung suaranya dengan meraih tak lebih dari 10 persen suara. AKP mengantongi sekitar 60 persen dari kaum Kurdi di kawasan tenggara Turki. Di Diyarbakir, AKP memperoleh 41 persen suara dari pemilu sebelumnya 16 persen. Maka AKP pun tegak berdiri sebagai partai dengan perwakilan Kurdi terbesar bersama keberadaan 75 politisi Kurdi dari 340 anggota parlemen asal AKP.

Namun ini semua masih perlu ditingkatkan. Rata-rata pendapatan perkapita di Diyarbakir, daerah termakmur Kurdi, berkisar 1300 dolar

pertahun, sedang rata-rata di Turki sekitar 5500 dolar. Penyelesaian konflik militer dengan PKK juga memerlukan kehati-hatian dari pemerintahan AKP. Erdogan mesti menjaga keseimbangan proporsional antara tuntutan militer dan sensitivitas kaum Kurdi. Yang jelas, masalah Kurdi terbukti lebih mungkin terselesaikan dengan pendekatan politik dan ekonomi ketimbang senjata.

Kepentingan Kurdi di Turki sudah terwakili. Bahkan Turki telah mengambil langkah-langkah bijaksana dengan mengutamakan kedamaian di kawasan tersebut. Langkah tersebut di antaranya adalah memberikan kursi parlemen bagi perwakilan Kurdi, dan juga otonomi khusus di wilayah yang berbatasan dengan sebelah Utara Irak.

Turki sudah mengakomodir orang-orang Kurdi dengan adanya keterwakilan mereka di Parlemen dan diberi otonomi sendiri. Sehingga Turki menganggap gangguan yang muncul dari Kurdi bukan berasal dari Kurdi yang ada di Turki, tapi Kurdi yang ada di Irak. Kurdi di Irak masih terus gerilya. Meskipun telah beberapa kali menyatakan gencatan senjata, tapi kemudian dibatalkan. Turki cukup bijaksana dalam menghadapi konflik yang terjadi selama pertengahan tahun 2007 dengan membuka jalur diplomasi seluas mungkin untuk penyelesaian damai.

Berdasarkan teori dari Fisher dan Abdi mengenai sasaran dan metode untuk mengelola konflik maka metode untuk mengelola adalah dengan mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak yang bertikai. Misalnya yang terjadi dalam tubuh PKK, ketika PKK berganti nama menjadi Kongres untuk Kebebasan dan Demokrasi (KADEK) sedang ARGK berubah menjadi Pasukan Pertahanan Rakyat (HPG). Ocalan pun mengajukan gagasan berdirinya suatu federasi wilayah-wilayah Kurdi dalam batas kedaulatan negara-negara yang ada tetapi menerapkan tiga hukum: Uni Eropa, Kurdi, dan hukum negara dimana wilayah Kurdi itu berada.

Fasilitasi lokakarya dan dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik diharapkan juga dapat mengidentifikasi ancaman-ancaman dan ketakutan yang dirasakan masing-masing pihak dan untuk membangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka.

PKK mengumumkan secara terbuka pada tanggal 13 Juni 2007 bahwa jika operasi militer Turki mereda, ketegangan dengan PKK juga akan mereda. Pernyataan ini muncul ketika Perdana Menteri Turki Tayyip Erdogan mengindikasikan ia akan menolak permintaan militer yang berpengaruh untuk melakukan serangan ke Irak Utara yang berdekatan guna mengejar pemberontak Kurdi Turki yang mengungsi di bagian tenggara Turki.

Menghadapi pemilihan umum 22 Juli 2007, pemerintah Turki menolak operasi lintas-perbatasan, yang juga dengan keras ditentang oleh Irak dan AS karena khawatir kerusuhan baru akan muncul di Irak.

Pengaruhnya terhadap hubungan kedua pihak sangat berkaitan erat dengan posisi ingin diterimanya Turki dalam Uni Eropa. Kesempatan Turki untuk masuk menjadi anggota Uni Eropa akan menjadi semakin besar jika ia dapat mencapai resolusi jangka panjang dalam masalah Kurdi baik dengan melaksanakan reformasi politik dan hukum untuk menghadapi pluralitas etnis yang mereka miliki melalui demokrasi liberal dan pembangunan ekonomi.

Masalah lain yang berhubungan dengan kehidupan politis Turki adalah dengan adanya pelanggaran HAM yang telah didokumentasikan oleh NGO local dan internasional (dapat dilihat dalam Amnesti Internasional tahun 1996; Human Rights Watch tahun 1996). Masalah HAM ini dapat mengganggu proses masuknya Turki ke dalam Uni Eropa.

Turki akan menjadi negara Uni Eropa pertama yang dengan populasi Muslim yang dominan dan akan menjadi contoh bagi masyarakat muslim regional lainnya. Hal ini juga akan meningkatkan kredibilitas dan politik ekonomi Uni Eropa sebagai salah satu aktor global dan juga sebagai proyek sosial politik untuk negara-negara berkembang pada umumnya dan dunia Muslim pada khususnya. Dengan semakin terlindunginya hubungan Turki dengan penduduk Kurdi di Turki melalui demokrasi dan pembangunan, maka semakin sedikit ia akan terancam dengan nasionalisme Kurdi di Irak dan negara lainnya. Dengan begitu Turki akan lebih mudah memfokuskan perannya di Timur Tengah melalui kontribusinya dalam kerjasama dan pembangunan regional. Dengan adanya demokratisasi vis a vis identitas Kurdi dan integrasi dengan Uni Eropa telah memfasilitasi "perubahan cepat Turki

dari posisi yang koersif menjadi lemah lembut dan membangun kekuatan regional yang konstruktif.” meskipun perubahan-perubahan positif ini belum tentu dapat terus berlanjut dan memastikan perdamaian jangka panjang dan rekonsiliasi dengan etnis Kurdi, apalagi dengan adanya ketidakpastian di Irak. Mengalami separatisme etnis dalam waktu panjang membuat Turki memiliki alasan yang layak untuk selalu perhatian terhadap pembagian kekuasaan bagi etnis dan tidak menyetujui federasi etnis di Irak.

Kunci bagi perdamaian regional dan pembangunan sosio ekonomis adalah untuk memastikan bahwa konfigurasi politik di Irak Utara akan lebih stabil dan akan membentuk hubungan kerjasama yang kooperatif dengan Turki. Hal ini akan meningkatkan peran regional yang konstruktif bagi Turki dengan meningkatkan pembangunan ekonomi dan demokrasi.

Kurdi Irak secara ekonomi tergantung pada Turki dan di bawah konfigurasi politik seperti apapun akan lebih memilih untuk tetap membangun hubungan baik dengan Turki yang sedang menuju ke Uni Eropa. Pembangunan ekonomi yang sukses di Irak Utara akan membawa *spill over effect* yang positif bagi ekonomi di Turki Tenggara. Resolusi atas masalah ekonomi dan akibat ekonomi dari kemurkaan etnis di Tenggara membutuhkan kebijakan pembangunan yang lebih baik demi kepentingan Turki juga. Sebagai perbandingan, ketidaksukaan Kurdi Irak terlihat lebih mendukung *secessionism* di Turki untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan politis yang telah mereka lindungi sejak tahun 1991.

Dalam kerjasama dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa, Turki dapat memainkan peran kunci dalam pembangunan ekonomi dan demokrasi pasca perang. Kerjasama Turki dan Amerika Serikat meliputi proyek dimana Turki dapat menggunakan bantuan 8,5 milyar dolar sebagai kompensasi perang di Irak melalui pembangunan proyek di Irak Utara. Dari sudut pandang hubungan Turki-Kurdi adalah ketika proyek ini harus menciptakan hubungan sosial ekonomi yang saling menguntungkan dan adanya ketergantungan antara Turki dan Kurdi di Irak serta etnis lainnya. Proyek tersebut akan menciptakan kepercayaan dan mengurangi perselisihan antar pihak-pihak yang ada dan juga akan membangun hubungan baik seperti yang terjadi pada jaringan pipa

minyak *Yumurtalik* antara Irak dan Turki. Turki juga dapat memainkan peran penting dalam pelatihan yang dilakukan pihak keamanan di Irak dan dalam proses penyesuaian ke dalam sistem demokrasi.

